

**PENGARUH KEMBALINYA WILAYAH HONGKONG
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI
CINA**

SKRIPSI



Diejukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Triana Puji Lestari

NIM. 95-018

Dosen Pembimbing :

Drs. H. NURUDDIN M. YASIN



S
Klass
338.95
LES
P
@ 1
l

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

MOTTO :

Ilmu pengetahuan ini sangatlah berbahaya. Sebab pikiran dan hati seseorang yang piciklah akan memutarbalikkan ilmu pengetahuan itu. Tapi hati dan pikiran kotor itu dapat dihilangkan, bila kita duduk berdampingan dan membahasnya.

(Albert Einstein X-FILE, edisi 46/Th.I. 30Nov-6 Des 2000)

"Nasib bukan masalah kesempatan, tetapi suatu pilihan, ia bukanlah suatu yang harus ditunggu, melainkan sesuatu yang harus diraih"

(Willian Jeannings Bryan, Inti Sari/ Mei 1996. No. 394)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

- ❖ *Bapak MATMUNARI dan Ibu LATIANI atas segala doa, bimbingan, cinta kasih, perhatian dan pengertiannya yang tiada pernah henti terhadap penulis.*
- ❖ *Mas KOKOK, Mas YUDI dan Adikku UTOMO atas segala doa, cinta kasih dan nasehat serta dukungannya.*
- ❖ *Suamiku tercinta Mas NANDAR atas segala perhatian dan tempat mencurahkan segala keluh kesah penulis.*
- ❖ *Almamater tercinta.*

LEMBAR PENGESAHAN

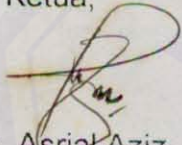
DIPERTAHANKAN DAN DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI SKRIPSI
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

Pada :

Hari : senin
Tanggal : 29 Januari 2001
Pukul : 10.00 BBWI
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

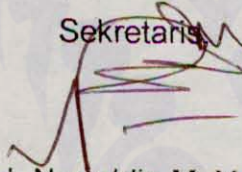
Panitia Penguji,

Ketua,



Drs. Asrial Aziz

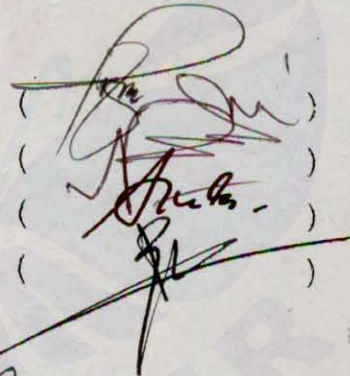
Sekretaris



Drs. H. Nuruddin M. Yasin

Anggota :

1. Drs. Asrial Aziz
2. Drs. H. Nuruddin M. Yasin
3. Drs. Sjoekron Syah, SU
4. Drs. Achmad Habibullah, Msi



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Dekan,

Drs. M. Moch. Toerki

NIP. 130 524 832

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana yang berjudul "Pengaruh Kembalinya Wilayah Hong Kong Terhadap Kebijakan Politik Ekonomi Cina". Karya ini adalah tugas akhir bagi penyusun untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S₁) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama dalam menyusun karya ini, tak jarang penulis mengalami kesulitan dan kekecewaan, namun puji syukur kepada Allah SWT. karena banyak bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak baik moril maupun spirituil, serta fasilitas dan bimbingan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Pra Adi Sulistiyo dan Bapak Agus Tri Hartono, S.Sos., selaku dosen wali penulis, beserta segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Seluruh staf dan karyawan di institusi tempat penelitian penulis, yaitu Perpustakaan FISIP Unej, Perpustakaan Pusat Unej, Perpustakaan CSIS. Terima kasih atas pelayanan, bantuan serta keramahamahaman-nya.
6. Seluruh Keluarga di Jakarta, atas bantuan dan pelayanannya selama penulis mengadakan penelitian.
7. Keluarga Lek Tien dan Om Toro beserta sikecil Niken dan Tito yang selalu memberikan keceriaan kepada penulis.

8. Teman-teman di Art Galery 77^A plus mbak Lutfi, Njok dan Gondrong. Terima kasih atas dukungan moril dan keceriaannya yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman HI angkatan 95.

Penulis memahami bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis selalu membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga karya tulis ini berguna bagi sesama, terutama penstudi ilmu politik.

Jember, Januari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.3 Problematika	7
1.4 Kerangka Dasar Teori	8
1.5 Hipotesa	11
1.6 Metode Penelitian Dan Pendekatan	12
1.6.1 Tahap Persiapan	12
1.6.2 Tahap Pengumpulan Data	13
1.6.3 Metode Analisa Data	13
1.6.4 Pendekatan	14

BAB II GAMBARAN UMUM HONGKONG

2.1 Sejarah Singkat Hongkong Sebagai Koloni Inggris	16
2.2 Sistem Perekonomian Yang Berlaku Di Hongkong	20
2.3 Perkembangan Ekonomi Hongkong	21

BAB III ANATOMI POLITIK EKONOMI CINA

3.1 Budaya Politik Cina.....	26
3.1.1 Terbentuknya Negara Komunis Cina	27
3.1.2 Supremasi Budaya	28
3.2 Kebijakan Ekonomi Cina	30
3.3 Hubungan Ekonomi Antara Cina Dengan Hongkong.....	34

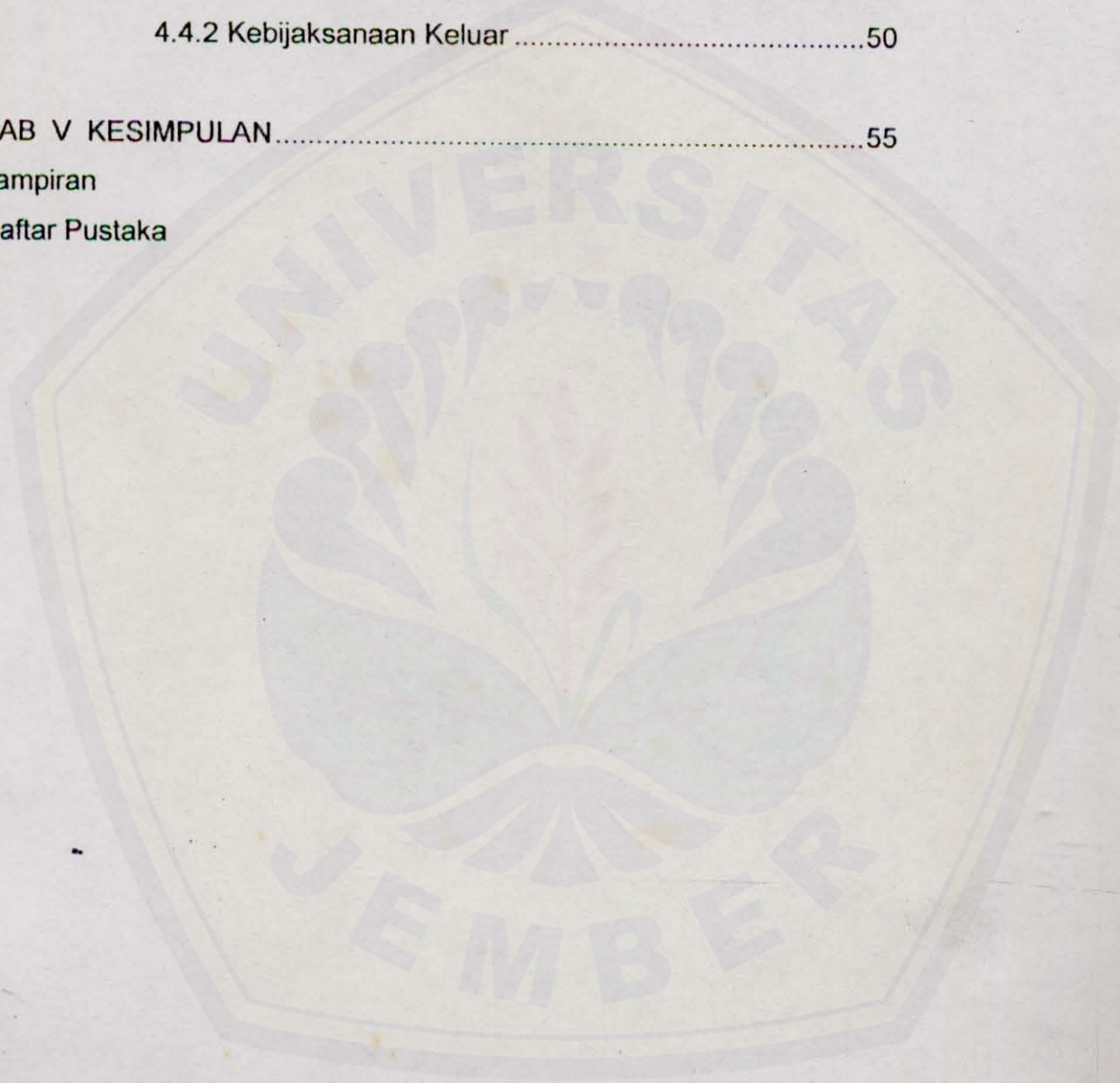
BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI CINA

4.1 Reunifikasi Hongkong-Cina.....	38
4.2 Cita-cita mewujudkan Cina Raya.....	40
4.3 Wajah Baru Komunis Cina.....	43
4.4 Penerapan Faham Komunis dalam Kebijakan Ekonomi Cina setelah Kembalinya Wilayah Hongkong.....	45
4.4.1 Kebijakan Kedalam.....	49
4.4.2 Kebijakan Keluar.....	50

BAB V KESIMPULAN.....55

Lampiran

Daftar Pustaka



I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Cina merupakan sebuah negara di kawasan Asia Timur yang mempunyai luas wilayah + 3.691.506 mil persegi dan juga terdiri dari multi ethnic. Cina juga terkenal dengan sejarah tradisionalnya yang besar ditambah dengan etos kerja rakyatnya yang baik, membuat cina menjadi negara yang besar yang mempunyai ciri tersendiri. Cina juga terkenal akan paham komunisnya, yang awalnya mendapat pengaruh dari Leninnisme Uni Soviet yang ternyata setelah diterapkan di Cina kurang sesuai.¹ Maka pada masa pemerintahan Mao Zedong telah mengadakan penyesuaian paham komunis terhadap keadaan Cina dan disejalankan dengan tradisi Cina, sesudah itu muncullah paham komunis Cina murni, walaupun dasar antara komunis Uni Soviet dan Cina adalah sama.

Sejalan dengan perkembangan jaman, maka Cina pun ikut berkembang. Cina bukan lagi sebuah negara yang mengisolir diri dari dunia luar tapi Cina berusaha menyelaraskan jalan dengan dunia internasional. Sejak diberlakukannya politik pintu terbuka (*Kaifang*) oleh Cina kepada dunia luar di tahun 80-an telah membawa negara tersebut menuju pembaharuan. Cina mengalami perkembangan pesat baik secara politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan maupun pola kehidupan sosial masyarakat. Image tentang RRC, yang identik dengan politik tirai bambu yang berusaha mengisolasi negaranya terhadap pengaruh bangsa lain, dengan segala keteringgalan dan keterbelakangannya dari negara luar telah pupus.

Selain telah menerapkan politik pintu terbuka, pemerintah Cina juga telah membuat tiga daerah khusus ekonomi (*Special Economi Zones, SEZ*)

¹ Republika, 10 Februari 1994.



yang terletak di propinsi Canton yaitu Shenzhen, Zhuhai (perbatasan dengan Macao), dan Shantou, tak lama setelah itu, di propinsi Fujian, diresmikan Xiamen masuk dalam daerah SEZ yang keempat dan 8 tahun kemudian, SEZ yang kelima dibentuk adalah pulau Hainan.² Cina juga mengalami modernisasi dalam segala bidang (Modernisasi 4) yang dikeluarkan pada masa kekuasaan Deng Xiaoping, yaitu pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertahanan. Modernisasi 4 ini didukung dengan ilmu teknologi dan modal yang besar dari Amerika Serikat, Jepang, juga Eropa Barat sebagai pusat ilmu pengetahuan dan gembong kapitalisme dunia. Deng berpendapat bahwa kemajuan Cina tidak mungkin akan dapat tercapai tanpa melakukan kerja sama dengan negara-negara yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih baik.

Untuk mengejar modernisasi, tidak ada pilihan lain bagi Cina selain mengingkari teori Maxis serta budaya politik komunis dengan merevisi doktrin politik yang kaku dan kultus individu pemimpin terpaksa dikorbankan khususnya kehidupan birokrasi politik sebagai pemeran utama dalam penentu kebijaksanaan yang cenderung disesuaikan dengan budaya negara-negara kapitalisme sebagai patner kerja mereka.

Dampak modernisasi tersebut secara perlahan dapat meningkatkan kemajuan dengan tercapainya kesuksesan disemua bidang. Dampaknya rakyat Cina mulai mengalami pergeseran nilai sosial dari masyarakat komunal dengan model "sama rasa sama rata" menuju pada pola masyarakat baru yang sadar akan privatisasi dan kecenderungan konsumerisme yang meningkat.³ Walaupun dalam bidang pemerintahan perubahan tersebut belum terlihat. Buktinya, masih banyak hal yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial seperti masih adanya perlakuan istimewa

² Merdeka, 22 Desember 1995

³ Merdeka, 15 September 1995.

berupakemudahan-kemudahan terhadap pihak tertentu seperti pejabat partai yang berkuasa.

Modernisasi di Cina semakin berkembang sejak kembalinya Hongkong dan Macao ke Cina. Hongkong merupakan daratan Cina yang dikuasai Inggris selama 156 tahun yang berawal dari kekalahan Cina pada jaman dinasti Qing dalam perang candu (1841) melawan Inggris.⁴ Hongkong kembali ke Cina pada tanggal 1 Juli 1997. Sedangkan Macao merupakan daerah Cina yang berada dibawah kekuasaan Portugis yang dikembalikan ke Cina pada tanggal 30 Desember 1999. Baik Hongkong maupun Macao merupakan kawasan pusat perekonomian dan perdagangan internasional. Hongkong adalah salah satu pusat ekonomi paling terbuka di dunia (menurut standart sistem ekonomi pasar), mempunyai pelabuhan bongkar muat paling sibuk di dunia, menduduki rangking ke-3 sebagai sistem ekonomi paling kompetitif didunia karena rendahnya pajak, kapasitas pelabuhan udaranya termasuk 5 besar di dunia. Selain itu, pasar modal Hongkong adalah terbesar ke-2 di Asia setelah Tokyo dan menduduki urutan ke-8 di dunia, Hongkong juga menjadi sumber infestasi asing terbesar di Asia.⁵ Sedangkan Macao merupakan pusat perjudian terbesar di Asia dan kota pariwisata yang terkenal yang membuat roda perekonomiannya berjalan dengan cepat.

Karena itulah, ketika kedua wilayah tersebut (Hongkong dan Macao) kembali ke pangkuan Cina telah membawa perubahan pada masing-masing pihak baik bagi Cina sebagai negara induk ataupun bagi Hongkong dan Macao sendiri. Hal ini wajar karena baik Hongkong ataupun Macau mempunyai pemerintahan yang berdasarkan liberal - kapitalisme sedangkan

4 , *RRC Menjelang Tahun 2000 (Dengan Latar Belakang Sejarah Cina Kuno)*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1986, hal. 30.

⁵ Analisis CSIS, 1997, Edisi 6, hal. 56.

pemerintah Cina daratan sendiri yang dulunya diperintah oleh sistem komunis.⁶ Hal ini semakin memantapkan Cina untuk mewujudkan keinginannya tentang pembentukan Cina Raya, ini merupakan obsesi Cina sampai saat ini. Semua kawasan yang termasuk dalam "the lost teritorial" nantinya akan digabungkan dengan daratan utama (*main land*) dan akan dikenal dengan sebutan "*The Greater China*". Apabila semua wilayah tersebut telah bersatu maka Cina akan muncul sebagai satu kekuatan terbesar di dunia.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Jiang Zemin sebagai presiden Cina memberikan penegasan tentang konsep "*yige guojia, liang zhong cedu*" (*one country two systems*) pada kongres PKC ke-14, dimana hanya ada satu Cina yang akan terdiri dari Hongkong, Macau dan Taiwan.⁷ Ketiga wilayah yang dianggap bagian dari kedaulatan Cina, yang akan tetap diijinkan untuk tetap mempertahankan sistem kapitalnya. Untuk membuktikan pernyataan tersebut maka Cina mengeluarkan *Basic Law* (BL) pada tahun 1990 dan nama resmi Hongkong menjadi *Hongkong Special Administrative Region* (HKSAR) serta memberikan masa transisi kepada Hongkong sampai dengan 50 tahun yang akan datang, juga pembentukan daerah SEZ untuk mengimbangi kedudukan Hongkong dan Macao.

Dari sini pula timbul sikap pesimisme dari berbagai negara, karena Cina selama ini kerap tidak konsisten terhadap berbagai keputusan dan agreement terutama dengan negara tetangganya sendiri, salah satu contohnya kasus pulau Sparty di lautan Cina. Untuk mengatasi hal yang demikian, Cina berusaha memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain-lain dan berusaha untuk tetap memegang komitmennya, terutama bila menyangkut kebijaksanaan *one country two systems*-nya.

⁶ Surabaya Post, 19 Desember 1995.

⁷ Kompas, 2 Juli 1997.

Walau Cina tetap berusaha untuk terus memegang komitmennya tentang *one country two systems*, tetapi hal ini membuat masalah Cina juga akan semakin rumit, terutama masalah terbatasnya sumber daya alam yang hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya secara keseluruhan dan bila Cina tetap melancarkan sistem kapitalismenya, maka kesenjangan sosial akan terjadi. Untuk itulah paham komunis merupakan salah satu alternatif untuk menyatukan seluruh Cina sebagai dasar negaranya.

Berdasarkan serangkaian uraian diatas maka fenomena yang melingkupi tetap dipertahankannya paham komunis Cina, menarik perhatian penulis untuk membahas dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul :

" Pengaruh Kembalinya Wilayah Hongkong Terhadap Kebijakan Politik Ekonomi Cina "

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan analisa masalah secara sistematis dan terarah maka diperlukan ruang lingkup pembahasan. Hal ini untuk menghindari kerancuan yang ditimbulkan oleh luasnya masalah. Pembatasan tersebut dimaksudkan pula agar pengkajian terhadap fenomena tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan.

Sebagai mana yang dikatakan oleh Joseph Frankel," pada titik-titik tertentu kejadian historis adalah unik, karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, semakin sukar untuk membuat pernyataan".⁸

Ruang lingkup pembahasan ini meliputi batasan waktu dan batasan materi sebagai berikut :

a. Batasan Waktu

Batasan waktu yang diambil oleh penulis dimulai sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Penulis mengambil tahun 1997 karena pada saat

⁸ Joseph Frangkel, *Hubungan Internasional*, Yayasan Obor, Jakarta, 1980, hal.20.

itu Hongkong masuk menjadi wilayah Cina yang selama 156 tahun dibawah kekuasaan Inggris, serta adanya perjanjian antara pemerintah Cina dengan Inggris untuk memberikan masa transisi kepada Hongkong sampai 50 tahun yang akan datang. Sedangkan pada akhir 1999 karena wilayah Macao yang semula diduduki Portugis juga dikembalikan ke Cina. Kedua wilayah tersebut selain mempunyai dasar sistem pemerintahan yang sama adalah liberal-kapitalisme juga karena mereka sama-sama mempunyai kawasan pusat perekonomian dunia. hal ini akan menjadikan Cina untuk berfikir dua kali sebelum memutuskan untuk menerapkan sistem komunisnya terhadap kedua wilayah tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan menganalisa aspek-aspek waktu diluar batasan waktu seperti yang tersebut di atas sepanjang masih relevan dan mendukung bagi pembahasan permasalahan.

b. Batasan Materi

Batasan materi menyangkut tentang politik ekonomi Cina yang komunis dengan ciri sistem yang terpusat, dalam segala urusan negara terutama masalah kebijaksanaan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat karena semuanya untuk kepentingan negara. Sedangkan Hongkong sebagai bekas koloni Inggris memiliki faham yang liberal, karena itu dalam politik ekonomi Hongkong diterapkan kebijaksanaan tidak ikut campurnya negara terutama dalam sektor swasta. Tentu saja hal ini dapat dilaksanakan karena Hongkong mempunyai otonomi yang kuat. Untuk mengimbangi keunggulan dan otonomi luas Hongkong, Cina terpaksa memberikan sedikit kelonggaran otonomi pada daerah-daerah SEZ, karena waktu dahulu hal tersebut tidak akan diberikan pada daerah-daerah di Cina. Untuk itulah sangat tepat jika konsep *one country two systems* diletakkan dalam konteks kerja sama, walaupun secara formal Hongkong berada dibawah kendali Cina. Hal ini juga

bukan berarti Cina tidak akan berusaha agar Hongkong menganut sistem komunis juga.

1.3 Problematika

Selama manusia masih hidup, selama itu pula tidak ada masalah yang tuntas. Hornby mendefinisikan problem sebagai "Pertanyaan untuk dijawab khususnya sesuatu yang sulit".⁹

Dalam setiap penelitian atau penulisan ilmiah, problematika adalah faktor yang sangat penting utamanya dalam memberikan arahan, sehingga sesuai dengan topik yang diajukan. Secara sederhana problematika diartikan sama dengan permasalahan. Problematika menurut Winarno Surachmand adalah

"Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita akan berjalan terus".¹⁰

Sehubungan dengan pengertian di atas, penyusun memusatkan perhatian pada pengaruh kembalinya wilayah Hongkong terhadap komunisme dalam kebijakan politik ekonomi Cina.

Bagi pemerintahan Cina yang awalnya dilandasi oleh paham komunis dan akhirnya berusaha membuka diri terhadap negara lain dengan menerima paham liberal dalam pemerintahannya. Ditambah dengan adanya perjanjian antara pemerintahan Cina dan Inggris yang memberikan masa transisi pada Hongkong selama 50 tahun ke depan. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk sedikit menghambat laju paham komunis dalam pemerintahan Hongkong sendiri maupun dalam perkembangan Cina sebagai main land.

⁹ AS Hornby, *Oxford Advance Learner's Scottish Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 1983, hal. 665.

¹⁰ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, CV. Transito, Bandung, 1975, hal. 33.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penyusun mengemukakan permasalahan sehubungan dengan judul yang telah ditetapkan dan terangkum dalam pertanyaan:

"Bagaimana pengaruh masuknya Hongkong terhadap Kebijakan Politik Ekonomi Cina yang menerapkan Komunisme ?"

1.4 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah konsepsi umum dalam dunia ilmu pengetahuan guna menganalisa suatu penelitian ilmiah. Kerangka dasar teori berguna sebagai alat untuk menjawab permasalahan. Menurut Koentjaraningrat, teori pada hakekatnya adalah ;1) untuk menyimpulkan generalisasi atas fakta-fakta yang dihasilkan dari analisa; 2) untuk menyediakan kerangka orientasi bagi analisa dan klarifikasi fakta yang diperoleh dari riset.¹¹

Mohtar Mas'ood secara sederhana mengemukakan bahwa teori adalah pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, mengapa dan mungkin meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.¹² Jadi teori adalah usaha untuk menerangkan fenomena yang terjadi dari sudut pandang tertentu. Kerangka dasar teori akan menjadi landasan untuk merumuskan hipotesis. Sebagaimana dikemukakan oleh Melly G. Tan

"Suatu kerangka dasar teori diperlukan guna membimbing kegiatan penelitian dan memilih konsep-konsep yang tepat dalam bentuk hipotesis".¹³

¹¹ Koentjaraningrat, *Metoda penelitian masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 19.

¹² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 185.

¹³ Melly G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian*, Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 48.

Berdasarkan pengertian diatas, penyusun menggunakan kerangka dasar teori pengambilan keputusan (*decision Making Theory*) sebagaimana yang dikatakan oleh Richard C. Snyder dan kawan-kawan adalah :

"Pembuat keputusan (Decision Making) adalah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, pemilihan sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh pembuat keputusan. Esensi dari setiap pembuatan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan yang ada demi kesinambungan kehidupan suatu bangsa".¹⁴

Sedangkan menurut Abdul Said dan Charles Larche adalah

"Decision Making Theory adalah merupakan teori tentang proses pengambilan keputusan. Dimana pengambilan keputusan ini dilatarbelakangi oleh politik, ekonomi, sosial dan lain-lain".¹⁵

Disebutkan pula bahwa :

"Decision Making juga berhubungan dengan politik luar negeri suatu negara. Maksudnya selain faktor dalam negeri, faktor-faktor luar negeri akan mempengaruhi Decision Maker dalam menentukan langkah-langkahnya".¹⁶

Dengan demikian, dapatlah dikatakan dari berbagai arti Decision Making pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pilihan dari berbagai alternatif yang tidak menentu. Sedangkan Decision itu sendiri merupakan suatu hal yang sifatnya individu, yang apabila diterapkan dalam satu bentuk kebijaksanaan tidak akan bisa terlepas dari adanya peranan pribadi seorang decision maker.

¹⁴ Richard C. Snyder, *Foreign Policy Decision Making*, Gramedia, Jakarta, 1962, hal. 40.

¹⁵ Abdul Said dan Charles larche, *Conseps of International politics*, Englewood Cliff, Nj Prentice Hall, 1963, hal. 32.

¹⁶ Ibid, hal. 34.

Decision making juga sangat dipengaruhi oleh filsafat hidup, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan decision maker, karena decision making ini sendiri merupakan pilihan dari berbagai alternatif. Maka pilihan itu tentu sangat tergantung juga terhadap decision maker, dalam arti kata pilihan yang ada merupakan alternatif yang terbaik dan paling menguntungkan.

Mengingat yang demikian ini, maka pemerintahan Cina menentukan kebijaksanaan politik terutama politik dalam negeri. Pembaharuan di suatu negara merupakan hal yang menarik terutama bila hal tersebut dilakukan di negara komunis. Hal ini disebabkan karena negara komunis mempunyai sistem yang sangat terpusat dan tipis kemungkinan untuk terjadinya suatu pembaharuan tanpa persetujuan dari partai dan pemerintah.

Masuknya Hongkong dan Macao ke Cina telah membawa suatu perubahan penting dalam kehidupan ekonomi dan politik Cina. Berbagai pertimbangan telah mendorong Cina untuk meninjau kembali kebijaksanaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan Cina dalam melaksanakan kebijakan barunya berasal dari dalam dan luar negeri.

Faktor dalam negeri ialah masalah ekonomi di Cina yang semakin mantap dengan masuknya Hongkong dan Macao, dan hal ini mendorong Cina untuk segera mewujudkan impiannya tentang Cina Raya dengan berusaha memasukkan kembali Taiwan ke dalam wilayahnya. Tapi perbedaan paham antara Cina dengan kedua wilayah tersebut (Hongkong dan Macao) membuat Cina berusaha untuk mengendalikan keinginannya.

Sedangkan faktor dari luar negeri adalah kecurigaan dari dunia internasional atas Cina. Ekonomi Cina yang semakin mantap dicurigai akan semakin menyuburkan perkembangan paham komunis Cina. Hal ini akan menjadi ancaman terbesar bagi dunia internasional. Apalagi bangsa-bangsa Eropa masih punya kepentingan ekonomi dengan Hongkong maupun Macao.

Dari uraian diatas bisa kita dapatkan suatu pengertian bahwa sejak masuknya Hongkong dan Macao ke Cina membuat Cina semakin berhati-

hati menentukan kebijaksanaan politik ekonominya guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan Cina yang ingin memperbaiki citra dirinya dalam pandangan dunia Internasional.

1.5 Hipotesis

Sebuah hipotesis adalah formulasi jawaban sementara yang bertindak sebagai pemberi jawaban yang benar, terlebih dahulu harus dibuktikan dengan riset. Namun diharapkan hipotesis memuat jawaban yang benar. Yang lebih relevan dengan studi ini, diberikan oleh Sofian Effendi yang mendefinisikan hipotesis sebagai kesimpulan sementara mengenai hubungan antar variabel. Hipotesis seharusnya menggambarkan hubungan antar variabel dan perlu penyediaan arahan tentang itu diversifikasikan.¹⁷

Semenjak masuknya Hongkong dan Macao ke dalam Cina, membuat Cina semakin berambisi untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi Cina Raya dengan memasukkan Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Sedangkan di pihak lain Cina harus konsisten dengan janjinya tentang pelaksanaan *one country two systems* karena baik Hongkong dan Macao menggunakan dan terbiasa dengan sistem liberal-kapitalisme, sedangkan Taiwan dengan sistem demokrasinya, dan Cina sendiri menggunakan sistem komunis dalam pemerintahannya, ditambah dengan adanya perjanjian antara Cina dengan Inggris untuk memberikan masa transisi kepada Hongkong sampai 50 tahun yang akan datang.

Dari sini, maka dapat kita lihat suatu yang amat positif bagi keberadaan suatu negara yang mengadakan pembaharuan dalam bidang politik, khususnya politik ekonominya, dimana hal ini tidak setiap saat terjadi. Untuk itu penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut :

¹⁷ Sofian Effendi, *Unsur-unsur Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 18.



- Setelah Hongkong kembali ke Cina, Kebijakan politik ekonomi Cina yang komunis telah mengalami perubahan ke arah yang lebih liberal, karena Cina harus menerapkan dua sistem dalam satu negara.

1.6 Metode Penelitian Dan Pendekatan

Menjadi syarat dalam setiap penulisan ilmiah untuk mengadakan penelitian, yang sebelumnya harus disertai pula dasar-dasar pemikiran terhadap objek yang diteliti. Metode tersebut meliputi tehnik pengumpulan data dan tehnik penulisannya. Dengan ditetapkannya suatu metoda akan bermanfaat dalam membentuk kerangka berfikir dan berguna untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, agar karya ilmiah sistematis dan kronologis. Metoda penelitian meliputi tahapan-tahapan : persiapan, tahap pengumpulan data dan tahap analisa data.

1.6.1 Tahap Persiapan

Sebagai langkah pertama untuk melakukan sesuatu penulisan yang bersifat ilmiah, maka terlebih dahulu penulis lebih banyak mempersiapkan konsepsi-konsepsi teoritis melalui pengumpulan buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan maupun yang bersifat umum namun masih mengarah kepermasalahan, terutama konsepsi dasar sebagai penambah wawasan penulis, sehingga diharapkan penulisan skripsi ini menjadi tuntas. Selain itu dengan mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan yang dapat memberi arah pada sistematika berfikir mengacu pada proposal untuk dapat memberi gambaran mengenai materi penulisan.

1.6.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap kedua ini, merupakan tahap kelanjutan dan juga merupakan tahap penelitian sesungguhnya karena penulis ingin mencari fakta dari data sumber-sumber yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian dilaksanakan dengan riset perpustakaan (*library research*). Bahan dan data tersebut penulis peroleh melalui :

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember di Jember
3. Perpustakaan *Centre For Strategic And International Studies (CSIS)* di Jakarta

1.6.3 Metoda Analisa Data

Mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, maka metoda analisis data yang digunakan adalah metoda kualitatif, sedangkan tehnik analisis data adalah diskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksikan kemungkinan logis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini berkenaan dengan sasaran penulis yang memiliki prospek ke masa depan tentang kemungkinan bangkitnya paham komunis kembali.

Untuk mendapat hasil penelitian dan analisa yang baik, penulis menggunakan cara pendekatan deduktif, yakni cara berfikir dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁸ Prinsip deduktif adalah apa yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis tersebut.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 42.

Suatu kebijaksanaan politik yang diambil oleh suatu negara baik menyangkut masalah politik dalam negeri maupun politik luar negeri pasti akan diarahkan bagi pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan nasional negaranya. Dengan perkataan lain, rintangan-rintangan yang dianggap akan menghambat pencapaian tujuan dan kepentingan nasionalnya akan berusaha dieliminir ataupun dihilangkan. Sikap Cina untuk tetap konsisten dengan konsep *one country two systems*-nya merupakan upaya perwujudan hal tersebut.

1.6.4 Pendekatan

Untuk mencapai suatu sasaran bagi terwujudnya suatu karya ilmiah tentang suatu masalah tertentu, diperlukan suatu pendekatan. Berkaitan dengan masalah yang penulis angkat, maka pendekatan ini penulis anggap relevan adalah :

1. Pendekatan Sejarah.

Dalam pembahasan ini penulis juga memakai pendekatan kesejarahan (*history*). Pendekatan ini penting artinya bagi ilmu politik, karena mengembangkan bahan "data atau fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut".¹⁹

Dalam pendekatan sejarah terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Bahwa perubahan merupakan sesuatu yang pasti,
- b. Bahwa adanya kecenderungan yang dapat dibaca dengan meneliti proses politik masa sekarang dan kemudian memproyeksikan kecenderungan tersebut di masa depan.

2. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan ekonomi politik, yakni seperti yang disebutkan oleh Robert Gilpin :

¹⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal. 30.

“ Ekonomi-politik menjalankan interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik. Kadang-kadang teori ekonomi digunakan untuk pencapaian tujuan-tujuan politik atau sebaliknya”.²⁰

Menurutnya, keterkaitan antara politik dan ekonomi memberi dampak bahwa perubahan struktural dalam pusat-pusat aktivitas ekonomi akan membawa akibat-akibat politik, disamping itu faktor politik mempengaruhi sifat dan konsekwensi struktural ekonomi yang ada.

Dengan demikian dipakainya pendekatan ini, karena sejarah, ekonomi dan politik saling berkaitan dan mempengaruhi jua merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kehidupan manusia dan bangsa. Penggunaan analisa ini berkaitan dengan tradisi, kekuasaan, ekonomi, pemerintahan dan wewenang.

Seiring dengan pendekatan ini adalah paham komunis yang telah tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Cina, menyebabkan Cina harus mau mencoba kebijaksanaan *one country two systems* seiring dengan masuknya Hongkong dan Macao ke Cina. Hal ini sedikit banyak telah mampu menggeser kekuatan komunis Cina ke arah yang lebih liberal.

²⁰ Robert Gilpin, *U.S. power and The Multinational corporation*, dikutip oleh Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional; Kekuatan Utama*, Gramedia, Jakarta, 1993, Jilid II, hal.223.

BAB II

GAMBARAN UMUM HONGKONG

2.1 Sejarah Singkat Hongkong Sebagai Koloni Inggris

Hongkong merupakan wilayah Cina yang mempunyai luas 1.062 kilometer persegi, yang merupakan wilayah berupa perbukitan yang tidak punya sumber daya alam yang memadai kecuali hanya dari laut. Untuk itulah Hongkong mengandalkan perekonomiannya pada sektor laut, yang ditunjang dengan sejarah modern Cina sebagai bagian dari timur jauh bermula dengan terbukanya hubungan dengan dunia barat. Cina membuka diri dari ketertutupannya selama lebih dari satu abad sampai pertengahan abad 19. Sekitar tahun 1642 orang-orang asing tidak dapat bebas memasuki negara Cina kecuali beberapa peluang dalam hubungan dagang di Canton dan Macao.

Sejak tahun 1685 semua pelabuhan dagang Cina terbuka bagi pedagang asing, tetapi kongsi dagang Inggris (*English East India Company, EEIC*), hanya dibenarkan membangun pabrik serta perdagangannya di Canton. Selanjutnya Canton berkembang menjadi pusat dagang para pedagang asing. Kecenderungan pedagang asing lainnya (Prancis, Portugis, Belanda, dll) di Canton tampaknya sejalan dengan kebijaksanaan penguasa Cina, yang kemudian pada tahun 1757 mengeluarkan peraturan bahwa seluruh perusahaan asing harus berpusat di Canton.

Para pedagang asing yang datang dari berbagai negara tersebut memperjual belikan beraneka ragam barang mulai dari tekstil sampai makanan. Tetapi yang paling diminati oleh orang-orang Cina adalah candu (*opium*). Penjualan opium yang meningkat di Cina menarik ketidaknyamanan

orang-orang di pemerintahan kerajaan Cina.¹ Sehingga pada tahun 1796 import dan mengolah candu dinyatakan terlarang di wilayah kekuasaan Dinasti Qing. Akan tetapi sudah meluasnya mandat candu dikalangan pegawai sipil, tentara, maupun rakyat jelata, ditambah dengan meraja-lelanya korupsi, membuat larangan-larangan dan peraturan-peraturan pemerintah tidak dapat diberlakukan dengan baik. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka kaisar memerintahkan untuk mengusir seluruh kapal yang digunakan untuk mengangkut candu (1812). Dalam keadaan yang serba tegang tersebut, tampak jelas terjadinya kemerosotan yang tajam dalam perdagangan Cina dengan bangsa-bangsa asing.

Hal ini juga menyebabkan banyaknya perselisihan diantara kedua belah pihak, terutama antara Inggris dengan Cina sendiri. sehingga Raja Muda dari Hunan dan Hu Bei yang bernama Lin Ze Xu mengajukan perkiraan bahwa apabila masalah candu tidak ditanggulangi secara tuntas, maka dalam waktu singkat tentara dan pegawai negeri akan kehilangan daya gunanya, dan negara akan hancur sama sekali. Sarannya ;

- 1) Agar semua alat pengolah dan pengisapan candu disita untuk kemudian dihancurkan;
- 2) Agar semua pemandat candu ditampung dalam panti-panti rehabilitasi;
- 3) Agar mereka yang terlibat dalam perdagangan, penyimpanan, dan pengangkutan candu dijatuhi hukuman berat.

Pada akhirnya Lin Ze Xu diangkat sebagai Komisioner Anti-Narkotika.

Tahun 1839 Komisioner Lin Ze Xu menangkap salah seorang pimpinan Factory Inggris. Karena tidak bersedia menandatangani janji untuk tidak memperdagangkan candu yang dituntut oleh pemerintah Canton, maka seluruh Factory dikepung oleh pasukan Qing, beserta 350 orang asing

1. Journal Of Social, Political and Economic Studies Monograf Series, Vol. 18.

didalamnya. Untuk menghindari bentrokan fisik, maka Superintendent Eliot memerintahkan kepada segenap warga Inggris untuk menyerahkan candu milik mereka kepada pemerintah Canton; dan setelah kepungan terhadap Factory tersebut dihapus, maka segenap warga Inggris dipindahkan dari Canton ke Macao. Akan tetapi tidak lama kemudian Komisioner Lin Ze Xu mengadakan inspeksi ke Macao dan menuntut agar segenap orang menandatangani "janji" termaksud. Untuk menghindari hal ini maka Superintendent Eliot mengusulkan lagi warga Inggris dari Macao ke suatu pulau karang 100 kilometer lepas pantai Canton, yang bernama Hongkong (26-08-1839).

Pada bulan November 1839 kapal Royal Saxon yang bermaksud untuk meberikan peringatan dengan melepas tembakan meriam ketika sedang memasuki Hu Men. Hal ini dianggap sebagai provokasi oleh pemerintah Canton, sehingga mereka diserang oleh angkatan laut Dinasti Qing dipangkalan Quang Bi. Tembak menembak terjadi maka pecalah apa yang disebut perang candu.

Secara resmi perang Candu yang dimenangkan oleh pihak Inggris dan diselesaikan dengan dua buah traktat, yakni Traktat Nanking (1842) dan Traktat Boque (1843). Kedua traktat itu memuat prinsip dasar yang mengatur status Internasional Cina dalam kurun waktu hampir satu abad.

Isi dari perjanjian Nanking yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1842 adalah :

1. Pampasan perang

- ⊕ \$ 12 juta ongkos pasukan
- ⊕ \$ 6 juta pengganti candu yang disita pemerintah Qing
- ⊕ \$ 3 juta pengganti kerugian yang diderita Inggris dalam perdagannya dengan cohong.

Jumlah \$ 21 juta dolar.

2. Penghapusan sistem monopoli cohong
3. Dibukanya 5 kota (Canton, Amoy, Foochow, Ningpo, dan Shanghai) untuk perdagangan, tempat tinggal dan pembukaan konsulat Inggris
4. Pelepasan pulau Hongkong dari kekuasaan Dinasti Qing untuk dijadikan milik Inggris
5. Adanya tarif bea cukai yang pasti.

Sedangkan perjanjian Boque diadakan sebagai perjanjian tambahan yang ditandatangani pada 18 oktober 1843, isinya adalah :

1. Adanya prinsip "extraterritoriality" yang pada pokoknya menentukan, bahwa warga negara Inggris di wilayah Cina yang melanggar hukum atau melakukan tindakan pidana hanya dapat ditangkap dan diadili oleh pemerintah Inggris atau perwakilan dari padanya;
2. Kapal perang Inggris diperbolehkan berlabuh di pelabuhan Cina berdasarkan perjanjian Nanking;
3. Berlakunya prinsip "negara dengan pelayanan terbaik" (most favoured nation treatment) yang menentukan, bahwa Dinasti Qing memberi kepada Inggris segala hak yang akan diberikan kepada negara lain.²

Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut sesungguhnya Dinasti Qing sudah tidak berdaya lagi membendung segala kemauan dari Inggris. Bahkan kedaulatannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini merupakan penghinaan terbesar bagi bangsa Cina.

² W.D.Sukisman, *Sejarah Cina Kontemporer*, PT Pardia Paramita, Jakarta, 1992, Jilid I, hal. 58-59.

2.2 Sistem Perekonomian yang berlaku di Hongkong

Hongkong merupakan suatu wilayah yang selama 156 tahun di bawah kekuasaan bangsa asing (Inggris), maka sistem perekonomian yang ada di Hongkong hampir memiliki kesamaan dengan negara tersebut yaitu sistem perekonomian yang liberal.³ Hal ini dapat dilihat dari pemberian otonomi luas kepada para pengusaha yang bersaing dalam dunia bisnis ataupun memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berusaha.

Sistem perekonomian yang berlaku di Hongkong, telah diatur dalam Join Declaration (JD) 1984 dan Basic Law (BL) 1990, yang menyangkut semua ketentuan perekonomian yang akan berlaku di wilayah hongkong pasca reunifikasi. Menurut BL 1990 dan JD 1984 Hongkong akan mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri, kecuali untuk masalah dan kebijaksanaan luar negeri serta masalah pertahanan keamanan. Tetapi sebenarnya Hongkong masih mempunyai hak-hak tertentu seperti boleh mengadakan kerjasama dengan negara lain atau institusi internasional lain di bidang ekonomi, fiskal, dan budaya (BL pasal 151).⁴ Karena itulah Hongkong memiliki suatu sistem perekonomian yang independen serta berbeda dari yang lainnya atau dapat pula dikatakan bahwa Hongkong memiliki otonomi yang luas.

Sistem keuangan di Hongkong meliputi bank-bank lokal dan kantor-kantor cabang dari bank asing yang bisa berhubungan secara langsung dan cepat dengan seluruh dunia, serta adanya pergerakan yang bebas dari sektor modal memungkinkan untuk mengatur tingkat pertukaran dan kepentingan. Semua ini juga dibantu dengan adanya hubungan dengan pasar komoditi dengan banyak negara.

³ Bisnis Indonesia, 19 April 1998.

⁴ Analisia CSIS, Vol.6, 1997, hal.625.

Perekonomian di Hongkong ditunjang dengan adanya sarana yang sangat lengkap dan canggih, menyebabkan perputaran roda ekonomi semakin cepat. Sarana-sarana tersebut seperti jaringan akses internasional yang cepat, bandar udara internasional yang canggih, ataupun pelabuhan peti kemasnya yang mampu menampung banyak barang.

Pemerintah Hongkong memberikan pajak pendapatan sebesar 5% serta pajak yang rendah pada kerjasama yang diadakan terutama kerjasama dengan wilayah Asia dan Asia Tenggara, merupakan salah satu infra struktur yang menjadikan kekuatan kompetitif di Hongkong.⁵ Hal ini semakin merangsang masuknya modal asing. Akses kredit juga mudah didapatkan di Hongkong. Perkembangan perekonomian Hongkong merupakan suatu tantangan tersendiri mengenai modernisasi di bidang ekonomi yang seiring dengan berjalannya konsolidasi sistem politik dan peradilan.

2.3 Perkembangan Ekonomi di Hongkong

Sejak dibukanya RRC kepada dunia luar pada tahun 80-an, sebuah era baru di Hongkong telah dimulai yang mana akan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut untuk selanjutnya. Apalagi setelah berada dibawah kekuasaan Inggris, perekonomian Hongkong semakin maju pesat dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan sektor ekspor yang sangat produktif. Bukan hanya dalam dua bidang itu saja, tetapi Hongkong berusaha untuk meningkatkan segala sektor perekonomian seperti industri, jasa, investasi, perbankan juga media dan telekomunikasi.

Hongkong dewasa ini memberikan titik fokus aktifitas ekonominya dibidang industri jasa. Malah, Hongkong telah siap dan optimis memasuki abad 21 dengan strategi yang terencana dengan baik. Dengan strategi

⁵ Asia 1996 Year Book in Far Eastern Economic Review, no. 623, 1998, hal. 118.

pengembangan industri jasa diperkirakan Hongkong sebagai pusat industri jasa terbesar terutama dikawasan Asia Pasifik.

Strategi Hongkong seperti itu bisa dimaklumi karena posisi menarik Hongkong yang menguntungkan dengan berada ditepi selatan Cina. Liberalisasi perekonomian Cina ditambah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tampaknya Hongkong akan melakukan secara intensif proses realokasi industri ke Cina, sementara industri yang bernilai tambah tinggi akan tetap berada di Hongkong.

Bagaimanapun juga modernisasi perekonomian di Hongkong tidak dapat lepas dari pengaruh Inggris sebagai negara "atasannya" dibandingkan dengan pengaruh dari Cina sendiri. Sementara sektor pariwisata kurang begitu penting, tapi sektor industri jasa yang mengalami booming di Hongkong, karena kebanyakan dari para pendatang yang ada bukan semata untuk berpariwisata tetapi mereka datang ke Hongkong dengan tujuan bisnis. Dari industri jasa inilah total nilai ekspor jasa Hongkong mampu terpompa hingga US\$291 miliar pada tahun 1996, padahal pada tahun 1985 baru berada pada US\$6 miliar.⁶ Industri jasa Hongkong ini didukung dengan keterbukaan ekonomi global yang dapat menyumbang 83% dari total produk domestik bruto Hongkong dan memberi lapangan pekerjaan pada 80% penduduknya.

Pemerintah Hongkong akan terus memacu geliat ekonominya dengan memberikan dan melengkapi sarana-sarana ekonomi serta infra struktur yang dianggap perlu. meskipun Hongkong bukan anggota PBB tetapi Hongkong justru menjadi anggota aktif beberapa badan PBB. Hongkong adalah anggota ESCAP, UN Commision on Drug, UNTAD, FAO, IAEA, ILO, INTERPOL, WHO, World Meteorological Organization, International Maritim Organization, IBRD. Selain itu Hongkong juga anggota ADB, PECC dan APEC.⁷

⁶ Media Indonesia, 17 April 1997.

⁷ The China Quarterly, No. 136, 1993, hal.706.

Sehingga daerah yang mempunyai otonomi penuh ini mempunyai banyak kesempatan untuk mengeksploitasi modal dengan lebih baik. Sebagai anggota New Industrial Countries (NIC), Hongkong benar-benar bagus apalagi dengan adanya Hongkong Monetary Authority (HKMA) membuat Hongkong mampu untuk menciptakan kawasan industri yang lebih mengangumkan. Hal inilah yang juga membuat Hongkong semakin diperhitungkan dalam percaturan ekonomi dunia.

Hongkong juga telah membuktikan sebuah perdagangan ekonomi yang aktif dan pusat keuangan di kawasan internasional selama dekade terakhir ini. Hal ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan GDP Hongkong yang mencapai 14,3% pada bulan pertama tahun 2000. Sedangkan ekspor-ekspor utama dari Hongkong termasuk tekstil, barang pabrik, peralatan mesin dan listrik, alat-alat dan barang-barang elektronik dan yang lainnya. Total ekspornya mencapai US\$18,7 billion. Impor-impor utama untuk booming ekonomi meliputi bahan-bahan mentah dan barang-barang konsumen, makanan, bahan bakar mineral, minyak pelumas dan lain-lain. Total impornya mencapai US\$207,1 billion.⁸

Munculnya Hongkong sebagai kawasan industri yang hebat tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari luar yang akan membawa resiko tersendiri. Oleh karena itu dituntut adanya suatu kapasitas penyesuaian internal yang cepat dan fleksibel yang memungkinkan kapasitas terhadap kesempatan atau mempunyai kemampuan untuk mengubah diri dalam menghadapi perubahan yang ada. Selama awal tahun 1990 merupakan masa ledakan hebat dari sektor pengembangan proyek infrastruktur yang besar, yang mana semakin membentuk otonomi perekonomian Hongkong di masa mendatang.⁹ Pembangunan terus dilanjutkan dibidang telekomunikasi, perdagangan, juga sarana transportasi,

⁸ Asia 1999 Year Book, Op. Cit., hal. 118.

⁹ The China Quarterly, no. 155, 1999, hal. 588.

termasuk didalamnya pelabuhan Hongkong juga pelabuhan peti kemasnya dan bandara internasional Kai-Tak yang berada di tengah-tengah kepungan gedung-gedung tinggi.

Tiga pintu keluar Hongkong ini bisa menjadi indikasi hebatnya kinerja di Hongkong. Bahkan Paulus Chen, seorang bankir dari Hensang Bank Hongkong mengatakan :

“Sumber daya manusia, lobi, Triad Cina dan kesepakatan para *overseas Chinese* di berbagai penjuru dunia untuk membangun Hongkong”.¹⁰

Faktor lain yang menunjang keberhasilan Hongkong adalah

- 1) Hongkong memang sudah menjadi salah satu bandar penting di asia timur, diluar Shanghai dan Guangzhou jauh sebelum diambil paksa oleh Inggris,
- 2) Etos kerja masyarakat Hongkong yang bagus.

Dengan adanya faktor-faktor diatas menyebabkan parameter untuk Hongkong bukan lagi kawasan atau lingkungan asia timur melainkan untuk dunia. Hongkong telah menjadi bandar niaga terkemuka di dunia. Pusat jasa angkutan laut, udara, hotel maupun jasa keuangan dan perbankan di Hongkong adalah salah satu terbaik di dunia. Masalah perfilman, masalah prostitusi juga industri kecil tumbuh subur di Hongkong, sedangkan masalah persaingan dengan negara lain terjadi karena Hongkong bisa membuat segala macam barang tiruan seperti merk arloji Piaget, Rolex, Omega, Seiko, atau kaos Lacoste, Greg Norman, Versance, DKNY, juga sepatu, kosmetik sampai ke parfum.

Hubungan Hongkong denan negara-negara lainnya, terutama dalam bidang bisnis dan ekonomi tidak terganggu dengan adanya persaingan-

¹⁰ Kompas, 19 Maret 1997.

persaingan tersebut. Hal ini semakin menyebabkan Hongkong berusaha untuk mempertahankan dan terus berhubungan dengan negara-negara tersebut, terutama negara industri maju. Ini semua sangat penting bagi Hongkong untuk menjaga stabilitas ekonominya.

Perkembangan dan kemajuan di Hongkong ternyata dirasakan belum sempurna sehingga pemerintah Hongkong masih berusaha untuk melengkapi sarana yang ada seperti membangun gedung dengan 80 lantai di Central Square ataupun di Tsuen Wan dan yang paling menakjubkan adalah pembangunan bandara baru yang super modern, yakni Chek Lap Kok New Airport yang terletak di depan hidung Lantau Island dan di seberang New Territories. Dibangun pula jembatan sepanjang 2,2 km serta *subway* yang menghubungkan beberapa kawasan penting Hongkong dengan bandara Chek Lap Kok ini.¹¹

Kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perdagangan telah dibuat sesuai dengan situasi Hongkong sekarang ini. Walaupun Hongkong Monetary Authority masih ada tetapi The People's Bank of China (PBC) sebagai pengawasnya. Hal ini hanya akan merubah sedikit keadaan yang ada karena sesuai dengan janji Cina yang memberikan masa transisi kepada Hongkong selama 50 tahun kedepan. Untuk menguatkan kedudukannya Hongkong telah menjalin hubungan kerjasama dan perdagangan dengan negara seluruh dunia. Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang bisnis, industri, ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Semua hal di atas menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Hongkong yang bisa mencapai hampir 11% dan income perkapita sebesar US\$7,950. Ini menggambarkan adanya standar kemakmuran di Hongkong yang tinggi.

¹¹ Kompas, 29 April 1998.

BAB III

Perubahan dan Anatomi Politik Cina

3.1 Budaya Politik Cina

Budaya politik Cina didasarkan pada budaya Konfusianisme, yang merupakan budaya tradisional Cina. Konfusianisme merupakan suatu filsafat moral dan sosial yang menekankan pentingnya hubungan yang etis dan keagungan manusia.¹ Konfusianisme juga mengajarkan pemuliaan terhadap nenek moyang dan orang tua secara sungguh-sungguh, telah memberikan kemantapan identifikasi diri dalam hubungan sosial. Hal ini yang menyebabkan rakyat Cina begitu percaya pada kemampuan dan selalu mengikuti nasehat para pemimpin mereka, walalupun pemimpin itu sudah tidak menjabat lagi.

Watak tradisi Cina yang relatif tidak berubah pada dasarnya dikarenakan ajaran Konfusianisme, yang telah berkembang selama lebih dari 2000 tahun. Ajaran Konfusianisme ini juga melahirkan etika kerja keras, tahan penderitaan, tekun, hemat, dan bersaing untuk maju, merupakan nilai kewiraswastaan yang telah dimiliki bangsa Cina sejak jaman dulu, sehingga membawanya pada negeri perdagangan yang makmur.² Semua ini merupakan faktor-faktor strategis dalam menumbuhkan perekonomian nasional Cina.

Memahami modernisasi di Cina juga berarti "tumbuh di luar tradisi", jika kita menggunakan investigasi perubahan kebudayaan (*Cultural Change*). Pendekatan ini menunjukkan pada struktur kepentingan dan tindakan. Budaya tradisional – modern dan asumsi bahwa kebudayaan merupakan

¹ *Bangsa Dan Negara*, Grolier Internasional, INC, PT Widyadara, Jakarta, 1990, Jilid 4, hal.15

² Poltak Partologi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 107.

bagian dari atribut individu. Jadi Cina mengkombinasikan kekuasaan independen yang diidamkan dengan selera bahwa kekuasaan adalah sewenang-wenang dan ada keharusan untuk mendamaikannya. Konsepsi ini mengakibatkan munculnya rasa takut mengekspresikan perbedaan pendapat.

3.1.1 Terbentuknya Negara Komunis Cina

Selama beberapa dasa warsa lamanya Cina dikuasai oleh kaum nasionalis. Tetapi karena pemusatan perhatian terhadap gerakan kaum Komunis Cina dan pengabaian kondisi ekonomi dan sosial oleh pemimpin kaum Nasional, ditambah lagi dengan lambatnya antisipasi terhadap mutasi Jepang telah menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Nasionalis.

Tahun 1921 terbentuklah Partai Komunis Cina (PKC) dengan bantuan Partai Komunis Uni Soviet dan memantau terus gerak kaum Komunis Cina. Sebagai partai baru maka Partai Komunis Cina berusaha untuk bekerja sama dengan Partai Kuomintang yang mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat Cina saat itu. Tapi dengan tampilnya Chiang Kai Shek sebagai orang nomor satu di Kuomintang menyebabkan kerjasama antara PKC dan Kuomintang menjadi hancur, karena dicopotnya anggota PKC dari struktur pemerintahan bahkan terjadinya pembantaian pada tahun 1927.

Sejak saat itu berkibarlah bendera pertentangan antara keduanya. Kaum Nasionalis mengadakan "pembersihan" terhadap kaum Komunis. Untuk melindungi dirinya, maka kaum Komunis Cina melarikan diri kedalam gunung-gunung atau hutan. Perjalanan yang sangat panjang dan berat ini lebih dikenal dengan sebutan *Long March*.

Long March, yang disertai dengan perjuangan melawan Kuomintang dan imperialisme Jepang telah memberikan kesan kepada rakyat Cina terutama para petani di pedesaan, yang merupakan inti dari Komunisme

Cina, apalagi PKC betul-betul berjuang terhadap tema sentral yang sangat menyentuh permasalahan petani di Cina saat itu adalah "*Landre Form*", sehingga dalam masa tidak terlalu lama anggota PKC telah membengkak menjadi jumlah yang sangat mengagumkan.³ Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan Jepang sebagai pihak yang kalah harus meninggalkan Cina. Pada saat itu Cina sedang dilanda inflasi dan hancurnya ekonomi. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang ada tidak ada jalan lain selain meminta bantuan luar negeri dan hal ini ditolak karena tidak stabilnya keadaan politik yang ada di Cina. Semua ini menyebabkan keadaan kaum Nasionalis semakin terjepit apalagi ditambah dengan diserahkannya senjata rampasan perang oleh Uni Soviet kepada Partai Komunis Cina. Akhirnya perang saudara tidak dapat dielakkan lagi dan perang kali ini telah melahirkan kaum Komunis sebagai pihak yang menang.

Dengan menangnya kaum Komunis maka tanggal 10 Oktober 1949 merupakan tonggak penting bagi sejarah Cina, karena PKC memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Komunis secara sistimatis dijadikan sebagai ideologi dan ajaran baru yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat Cina.

3.1.2 Supremasi Budaya

Dalam kalangan elit politik Cina berkembang kepercayaan bahwa untuk mengeksploitasi "kemahakekuasaan" adalah dengan menjauhkan sang pemimpin dari perhatian publik. Pemimpin Cina, masih dalam sistem logika di atas, diimajinasikan sebagai figur yang sesungguhnya mewakili dewa, lengkap dengan kekuatan kosmik naturalnya.⁴ Demikianlah, secara tradisional, sistem politik Cina menempatkan kelompok elit (penguasa dan

³ Jawa Pos, 16 Januari 1990

⁴ Kompas, 5 Nopember 1995

pejabat) dalam klarifikasi eksklusif, yang berarti membedakannya secara langsung dengan rakyat atau warga negara. Hasilnya adalah tertib sosial dua kelas : elite – massa.⁵

Sistem politik di RRC bertumpu pada hegemoni kekuasaan di PKC. Walaupun menurut Konstitusi 1982, semua kekuasaan negara yang ada di tangan rakyat, yang menjalankan kekuasaannya melalui Kongres Rakyat Nasional dan berbagai Kongres Rakyat Daerah. Kongres Rakyat Nasional juga mempunyai wewenang resmi atas berbagai masalah penting yang dapat mempengaruhi bangsa, seperti keuangan, perencanaan ekonomi, pernyataan perang dan perjanjian damai. Badan ini juga mempunyai wewenang untuk memilih dan mencopot para pejabat tinggi pemerintah, mengubah konstitusi dan mengeluarkan UU.⁶

Dewan Negara adalah badan tinggi pemerintahan negara untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh partai. Dewan Negara ini terdiri atas Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dari Departemen yang berbeda-beda, Ketua berbagai komisi dan seorang Sekjen.

Dewan Negara merupakan suatu badan administrasi, bukannya badan pembuat kebijaksanaan. Dewan Negara juga berfungsi sebagai "penasehat agung" yang merumuskan berbagai usulan kepada KRN atau Komite Tetap.

Sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi partai adalah Kongres Nasional. Namun berdasarkan struktur organisasi, pemegang kekuasaan riil berada di tangan Polit Biro. Anggota Polit Biro diangkat oleh Komite Sentral dan untuk menjalankan roda Polit Biro, dibentuk Standing Comitte yang beranggotakan 7 orang. Polit Biro adalah semacam tangan Komite Sentral

⁵ Moctar Mas' oed, Op. Cit, hal. 161.

⁶, Op. Cit. , hal. 39

yang juga mengatur acara Konggres Nasional Partai, disamping memilih kepala sekretariat yang disebut Sekjen Partai.⁷

Jadi para pemimpin Cina masih menggunakan standart kepemimpinan Cina Komunis yang semuanya menghargai penampilan yang tidak menonjolkan diri dan jarang memiliki kemampuan birokratik. Suatu budaya politik yang dibentuk oleh model perilaku birokrat Mandarin, pemimpin yang mengoperasikan segalanya tanpa terlihat dari belakang layar. Ini merupakan contoh nyata bagaimana supremasi budaya terhadap struktur kekuasaan dan rasio dalam merespon teknologi baru.

Reformasi yang diprakarsai Deng menghasilkan revolusi yang luar biasa. Dalam era Cina modern, ditampilkan "revolusi" tetapi dengan label yang lebih bersahabat "reformasi". Deng membawa Cina pada revolusi yang sesungguhnya. Pada era ini, kebijaksanaan yang diambil negara lebih banyak memberi manfaat bagi rakyat Cina, yang lebih menjadi berpengalaman membangun ekonomi, standart hidup yang secara otomatis mengalami peningkatan, rakyat dipacu untuk mencari yang terbaik bagi dirinya sendiri, rakyat Cina kini berlomba mencari kebutuhan yang paling substantif dalam hidupnya. Cina pada akhirnya, mencapai tahapan bangsa modern, meskipun masih tergolong berkembang.

3.2 Kebijakan Ekonomi Cina

Sebagai negara yang memegang erat tradisi dan kepercayaannya juga berideologikan Komunis, maka dalam pengambilan kebijaksanaan ekonominya Cina mengutamakan kepentingan massa atau negara. Hal ini juga dapat kita lihat dari kesadaran rakyat Cina untuk mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri.

⁷ Merdeka, 27 Februari 1997.

Reformasi ekonomi yang terus dilaksanakan di Cina mengalami pasang surut, tetapi setelah Deng mengajukan kebijaksanaannya membuat Cina semakin terpacu ke depan. Peningkatan dalam bidang ekonomi semakin terlihat, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 ternyata juga membawa efek pada perekonomian Cina, ditambah dengan masuknya atau kembalinya wilayah Hongkong ke Cina menjadikan tahun 1997 merupakan tahun yang penting dalam mengutamakan dasar yang kuat bagi kebijaksanaan reformasi pembangunan ekonomi Cina, khususnya dalam pelaksanaan repelita ke-9 (1996-2000) dan rencana pembangunan jangka panjang hingga tahun 2010.

Untuk menekan laju inflasi, mengendalikan pertumbuhan ekonomi, reformasi dan restrukturisasi khususnya di BUMN-BUMN, usaha-usaha terus dilaksanakan secara bertahap dan beberapa telah menunjukkan hasilnya meskipun menimbulkan masalah lain yaitu meningkatnya pemberhentian kerja dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,8% pada tahun 1999 dan pendapatan per kapita penduduk kota sebesar US\$ 619 naik 2,9% dan penduduk desa sebesar US\$ 250 naik 4%.⁸ Pelaksanaan pengawasan ekonomi makro melalui kebijaksanaan uang ketat dan pengawasan pasar telah berhasil mengurangi inflasi dari 6,1% pada tahun 1996 sampai 3,2% pada tahun 1999.

Peningkatan pendapatan yang ada, membuat Cina terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan untuk mendukung anggaran pembangunan. Dari penerimaan pajak pendapatan perorangan pada tahun 1999 naik 34,4%, dibandingkan tahun 1998. Kenaikan tersebut meningkatkan rasio penerimaan pajak pendapatan perorangan terhadap pajak industri dan komersial dari 3% pada tahun 1997 menjadi 3,44% pada tahun 1999.⁹

⁸ Laporan Tahunan DEPLU, 1999, hal. 39.

⁹ Ibid, hal. 45.

Dalam bidang perbankan, guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah, pemerintah Cina mengambil kebijaksanaan untuk menurunkan suku bunga bank hingga 1,1%–1,5% juga mengesahkan undang-undang harga dalam rangka mengawasi harga barang dan jasa di pasar dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasar sosialis.

Dalam bidang keuangan, pemerintah telah mengizinkan bank-bank asing untuk melakukan bisnis dalam mata uang RMB sebagai percobaan dan terbatas pada Pudong New Area (Shanghai). Hal ini untuk menunjukkan bahwa Cina semakin terbuka juga untuk melindungi infestasi asing serta usaha dagangnya di Cina. Mengenai jumlah uang yang beredar terus diusahakan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pasar sehingga dapat menolong meningkatkan pembangunan ekonomi dan menjaga kestabilan sosial.

Penanaman modal asing tetap diperlukan dalam rangka mempercepat pembangunan khususnya dalam membantu restrukturisasi perusahaan-perusahaan BUMN. Dalam rangka reformasi BUMN, investor-investor asing yang sebelumnya hanya diijinkan untuk membentuk perusahaan-perusahaan patungan dengan perusahaan-perusahaan BUMN atau mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing 100%, saat ini diijinkan untuk melakukan merger, leasing atau membeli perusahaan-perusahaan BUMN skala kecil dan menengah.

Untuk mendukung program Penanaman Modal Asing tersebut, mulai 1 Januari 1998 para investor asing mendapat pembebasan tarif dan pajak PPN dari peralatan yang diimpornya untuk proyek-proyek yang masuk dalam sektor-sektor yang didorong dan didukung pemerintah terutama yang menyangkut teknologi tinggi.

Meskipun reformasi dan restrukturisasi terus dilanjutkan namun tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam bidang

industri. Berdasarkan data Biro Statistik Cina, nilai tambah sektor industri meskipun naik 11,1% sehingga mencapai jumlah US\$ 382,5 milyar, namun tingkat pertumbuhannya lebih rendah 2,2 % dibandingkan tahun 1996.¹⁰ Penyebab utama dari lambatnya pertumbuhan tersebut adalah turunnya pertumbuhan di sektor perusahaan-perusahaan kolektif termasuk *township enterprises*.

Berkaitan dengan perusahaan *township*, meskipun pemerintah telah meminta untuk terus melakukan modernisasi manajemen, tenaga kerja maupun alatnya namun tampak masih sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena tenaga kerjanya sebagian besar penduduk desa yang kurang pengetahuannya, takut kehilangan pekerjaannya dan jauh dari pengawasan pusat.

Namun perusahaan *township* akan terus dipertahankan keberadaannya untuk melakukan bisnis utamanya di wilayah pedesaan dengan mengandalkan mekanisme yang fleksibel, upah buruh yang murah dan sumber-sumber yang banyak. Pada tahun 1998 perusahaan tersebut mampu menampung 132 juta tenaga kerja.

Cina juga terus mengusahakan terpenuhinya kebutuhan biji-bijian antara lain dengan cara memperluas tanah pertanian, intensifikasi pertanian dengan menggunakan teknologi maju, memperketat ijin penggunaan tanah pertanian untuk proyek-proyek industri dan melaksanakan Keputusan Bersama Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Dewan Negara yang diantara 13 butir keputusan bersama tersebut memerintahkan semua "*localities*" dan "*departrment*" Cina agar mengurangi beban para petani dengan cara tidak melakukan pungutan ilegal dan mengurangi beban lembaga atau perusahaan *township*. Disamping itu, pemerintah juga terus mengupayakan penggunaan teknologi maju seperti *bio-engineering* dan

¹⁰ Ibid, hal. 42.

gene-technology, memberikan fasilitas kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian di provinsi kedalaman Cina dan mereklamasi tanah terlantar dengan dampak pembangunan industri.

Pada sektor pariwisata, puncak usaha promosi telah disampaikan Cina ketika menjadi tuan rumah Komperensi PATA pada tanggal 20-22 April 1997. Dalam tahun 1997 jumlah wisatawan dari luar negeri yang berkunjung mencapai 57,59 juta orang, naik 12,6% dengan penerimaan devisa US\$ 12,1 miliar, naik 18,4% dari tahun sebelumnya.¹¹ Cina akan terus membuka pasar pariwisatanya lebih luas lagi dan memperkuat kerjasamanya termasuk *joint venture* dengan negara-negara lain.

Cadangan devisa yang dimiliki Cina terus meningkat, karena adanya pemasukan devisa yang besar dari sektor Penanaman Modal Asing, surplus neraca perdagangan luar negeri dan pariwisata serta tetap stabilnya nilai mata uang RMB. Untuk memenuhi rencana pembangunan ekonomi dan sosial tahun 1999 tersebut, Cina harus melaksanakan secara menyeluruh program yang diformulasikan pada Kongres Nasional ke-15 PKC yaitu mensukseskan reformasi perusahaan-perusahaan BUMN, mempercepat reformasi sistem keuangan dan memperbaiki sistem pengawasan makro terutama yang menyangkut koordinasi.

3.3 Hubungan Ekonomi Antara Cina Dan Hongkong

Pertumbuhan ekonomi dan fisik di Cina bagaimanapun juga tidak dapat lepas dari pengaruh serta telah diarahkan dengan adanya dominasi modal dari wilayah Hongkong maupun Macao. Kedua wilayah tersebut mempunyai kemiripan di dalam bentuk perekonomiannya, adalah ekonomi

¹¹ Ibid, hal. 44

yang berorientasi pada ekspor yang didasarkan atas industri padat karya semacam tekstil, sepatu dan mainan.

Adanya krisis keuangan yang terjadi di Asia awal Juli 1997, ternyata berakibat juga pada perdagangan di Hongkong dengan mitra lainnya seperti Cina, Jepang, Taiwan dan lainnya yang mengalami penurunan sampai awal tahun 1998. Sejak pertengahan dekade 1980-an. Para konglomerat Hongkong mendukung konglomerat Cina untuk melakukan pembelian aset-aset dan bisnis strategis di Hongkong. Sehingga perdagangan antara Hongkong dengan Cina berkembang cepat dan menempati posisi yang utama dalam keseluruhan perdagangan di Hongkong.

Jumlah total perdagangan Hongkong-Cina hingga mencapai US\$ 161 milyar dari total perdagangan luar negeri Cina yang hanya US\$ 325.2 milyar. Ini memperlihatkan indikasi bahwa Cina menggunakan Hongkong sebagai jembatan utama untuk perdagangan luar negerinya.¹² Ini karena keberadaan Hongkong di dunia internasional lebih mantap dari pada Cina sebagai negara induknya yang baru melaksanakan kebijaksanaan pasar bebas.

Hongkong sebagai pusat keuangan, perdagangan, investasi, transportasi, dan turisme, posisi Hongkong akan menjadi sangat penting untuk mengkoordinasi hubungan antara Hongkong dan wilayah-wilayah Cina yang lain di kawasan pantai timur Cina. Misalnya, saat ini Cina sedang menunjukkan perhatian yang serius pada pembangunan pelabuhan udara Chep Lak Kok di Hongkong dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi benturan kepentingan antara Hongkong dengan pelabuhan udara lain di wilayah Cina bagian selatan. Untuk itu pemerintahan pusat Cina telah mengembangkan sistem angkutan udara secara terpusat untuk semua pelabuhan udara di kawasan Pearl River Delta.¹³

¹² Andre M. Marton, *Hongkong In China : Perspectives From The Region*, Singapore University Press, University of Singapore, 1999, hal. 46.

¹³ Analisis CSIS, 1997 – 6, hal. 632

Kembalinya wilayah Hongkong ke Cina telah membawa perubahan besar di Cina sebagai negara induknya, karena saat ini Cina sedang mengadakan reformasi ekonomi. Hongkong telah membantu melancarkan jalannya reformasi ekonomi yang berlaku di Cina. Cina kini berusaha untuk pemeratakan kemakmuran yang ada di seluruh wilayahnya, supaya tidak terjadi ketimpangan kemakmuran antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.

Adanya zona ekonomi khusus yang sudah dipersiapkan Cina jauh sebelumnya, mempermudah Hongkong untuk bersosialisasi dengan negara induknya. Dengan kondisi perekonomian yang hampir sama menyebabkan kedudukan Hongkong dengan wilayah lainnya di Cina tidak begitu timpang. Hubungan yang terjadi antara Hongkong dengan zona ekonomi khusus ini diharapkan akan mampu memajukan perekonomian daerah tersebut khususnya dan Cina sebagai negara induk pada umumnya.

Menurut ketentuan masalah keuangan, Hongkong di bawah Cina akan memiliki sistem keuangan dan pajak yang independen terlepas dari Cina daratan, akan menggunakan sumber-sumber keuangan untuk Hongkong sendiri, dan tidak memberikan pendapatan yang diperoleh di sektor keuangan dan pajak kepada Beijing.

Hubungan antara Cina dengan Hongkong sampai saat ini hanya berkisar pada masalah perekonomian saja. Walaupun tidak semuanya berhubungan, tetapi di sini Cina sebagai negara induknya hanya sebagai pengawas saja. Hal ini dikarenakan adanya masa transisi Hongkong selama 50 tahun kedepan. Sedangkan masalah yang lainnya seperti masalah politik ataupun pemerintahan, Cina telah memberikan kebebasan kepada Hongkong dengan memberikannya otonomi yang luas.

Hubungan ekonomi antara Cina dengan Hongkong hanya sebatas hubungan yang saling melengkapi. Walaupun Hongkong sebagai wilayah dari

Cina sendiri, tapi Hongkong tidak mempunyai kewajiban lain selain menjunjung nama baik bangsa dan ikut memajukannya.



BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI CINA

4.1 Reunifikasi Hongkong Cina

Berdasarkan sejarah Cina, Hongkong jatuh ke tangan Inggris melalui perjanjian Nanking pada 26 Juni 1843. Dalam perkembangan selanjutnya digelar perjanjian Peking II yang ditandatangani pada 9 Juli 1889, dimana Inggris memperoleh hak sewa selama 99 tahun hingga 1 Juli 1987.¹

Dalam rentang waktu satu abad itu, ternyata Hongkong yang dulunya dianggap sebagai wilayah yang kurang prospektif, disulap oleh Inggris menjadi magnitute perekonomian di kawasan Asia Timur. Perekonomian Hongkong tampil dengan kinerja yang menakjubkan, seperti peningkatan yang terjadi antara tahun 1985-1994 saja perdagangan Hongkong naik 5 kali lipat, sehingga menjadikan dirinya sebagai pusat perdagangan ke-8 terbesar di dunia.

Posisi seperti itu sebagai dampak dari membanjirnya laju investasi asing yang pada gilirannya membuat Hongkong kian makmur. Karena itu, Inggris pada tahun 1987 kembali mencoba melakukan lobi dan membujuk Beijing untuk melanjutkan pemerintahan Inggris di Hongkong hingga 1 Juli 1997. Jelas sekali pemerintah Cina menolak usul tersebut, karena tentunya Cina mempunyai desain tersendiri guna membangun Hongkong paska penyerahan kedaulatan dari Inggris.

Walaupun pada akhirnya Cina sedikit melunak memberikan konsesi sampai 10 tahun (1987-1997), tetapi Cina tetap memberikan status Daerah Pemerintahan Khusus (*Special Administrative Region*) dengan otonomi tinggi selama 50 tahun ke depan sampai tahun 2047. Dengan konsep seperti itu kemudian Cina mendemonstrasikan konsep politiknya barunya yaitu *One*

¹ Media Indonesia, 17 April 1997

Country Two Systems. Konsep ini yang memudahkan Cina melakukan pendekatan ke teritorial Hongkong.

Setelah mengalami masa kolonialisasi Inggris selama hampir 156 tahun, Hongkong akhirnya kembali ke pangkuan pemerintahan Cina pada 1 Juli 1997. Adanya berbagai predikat yang menyatu dengan Hongkong-lah yang menyebabkan pemerintah Cina harus memberikan otonomi yang tinggi. Karena hal ini merupakan kesepakatan antara Inggris dengan Cina tentang masa berakhirnya kontrak Hongkong sampai memakan waktu 2 tahun.

Reunifikasi merupakan tugas historis yang berat tapi mulia bagi warga Hongkong, yang mengisyaratkan keuletan, ketabahan dan kelincahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mereka harus bertingkah laku pragmatis yang tega dan bijaksana yang tidak "disalah tafsirkan" sebagai *over acting*, yang pasti yang akan memancing antipati, iri hati atau permusuhan. Yang paling penting mereka harus mempunyai idealisme dan patriotisme tinggi dan bersedia berkorban tanpa pamrih memajukan nasib bangsa dan negara.

Inggris ingin memastikan dan meninggalkan Hongkong dalam keadaan kehidupan politik dan ekonomi yang mantap. Inggris ingin meninggalkan kesan baik dengan meletakkan kehidupan demokrasi yang lebih kuat terhadap Hongkong. Walaupun ide pembaharuan Inggris itu tidak sesuai dengan keinginan Cina, bahkan dengan konsep *One Country Two System* yang dipahami oleh Beijing selama ini.

Istilah *Two Systems* yang digembar-gemborkan selama ini diartikan Cina sebagai dua sistem ekonomi, bukan dua sistem politik atau kekuasaan. Sampai sekarang Cina memang menolak sistem politik lain selain komunis, sebaliknya Cina terbuka terhadap sistem ekonomi lain, bahkan proses liberalisasi dalam bidang ekonomi sedang dilaksanakan.²

² Umar Suryadi Bakri, *Pasca Deng Xiaoping, Cina, Quo Vadis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 74.

4.2 Cita-Cita Mewujudkan Cina Raya

Sejak diberlakukannya politik pintu terbuka (*kaifang*) oleh Cina pada dunia luar di tahun 80- an, telah membawa negara tersebut menuju pembaharuan. Reformasi (*gaige*) yang telah digulirkan guna meningkatkan perekonomian Cina guna mengejar ketertinggalannya di pasar dunia. Dilihat dari sudut ekonomi, Cina memperlihatkan kemajuan yang sangat fantastis. Hal yang perlu dicatat, ekonomi Cina pernah mengalami laju pertumbuhan besar ke dua di dunia. Pembangunan global yang paling berarti sejak Perang Dingin berlangsung tanpa genderang pembuka dan didaerah yang paling tidak diduga : Asia Tenggara. Cina Raya yang tengah bangkit, kini berubah cepat dari kubu Komunisme ke ekonomi pasar. Selama tahun 1980-an, dunia menyaksikan kebangkitan kekuatan ekonomi Asia baru. "Naga" ini sekarang sedang memperlihatkan kedinamisan yang tiada bandingannya, tumbuh lebih cepat dari pada naga kawasan Pasifik lain, seperti Korea Selatan, dan Jepang pada tahap awal pertumbuhan ekonomi mereka.

Negara adidaya ini bukanlah negara kesatuan tunggal, juga bukan merupakan blok perdagangan resmi Uni Eropa atau kawasan perdagangan bebas Amerika Utara (*North American Free Trade Area*). Sebaliknya, pembangunan ekonomi yang saat ini berbentuk kelompok pekerja dan pengusaha yang walaupun terpisah secara geografis dan politis, namun mempunyai strategi dan tujuan ekonomi yang sama. Nama kekuatan dunia yang sedang bangkit ini adalah Cina Raya. Sebagian analisis yang menggunakan ini mendefinisikannya sebagai penggabungan orang, pemerintahan, dan perekonomian Cina, Taiwan Hongkong dan Macau. Hal ini dikarenakan Hongkong, Macau dan Taiwan mempunyai hubungan yang erat dengan daratan Cina.³ Dari sudut pandang bisnis, Cina Raya sedang bangkit

³ Murray Weidenbaum & Samuel Hughes, *Jaringan Pengusaha Bambu (The Bamboo Network)*, Prehallindo, Jakarta, 1996, hal. 59-60.

dengan pesat sebagai pusat industri, perniagaan, dan keuangan dalam perekonomian dunia.

Secara politis masih ada bagian Cina raya yang terpisah. Kembalinya Hongkong 1997 dan Macau 1999 ke pangkuan Cina menyebabkan cita-cita Cina semakin mendekati kenyataan. Presiden Cina, Jiang Zemin, di kongres PKC ke-14 dalam pidatonya yang berjudul " Mengakselerasi reformasi, keterbukaan terhadap dunia luar, dan memacu modernisasi, agar tercapai keberhasilan yang gemilang dalam membangun sosialisme berkarakteristi Cina" ; Jiang menjelaskan pula mengenai gagasan tentang reunifikasi. Jiang mengatakan bahwa para pemimpin PKC telah mengajukan konsep *One Country Two Systems (Yige Guojia, Liang Zhong Cedu)*, dimana hanya ada satu Cina yang akan terdiri dari Hongkong, Macau, dan Taiwan. Ketiga wilayah yang dianggap dari kedaulatan Cina, yang setelah Reunifikasi diijinkan tetap mempertahankan sistem kapitalismenya.⁴

Dalam kurun waktu 100 tahun belakangan ini Cina telah mengalami metamorfosa seperti halnya dengan negara modern lainnya. Kata Naisbitt selanjutnya⁵: Kini Cina berkembang ke arah Kapitalisme, dan kalau Cina terus berkembang ke arah Kapitalisme itu, Cina akan mengambil alih kepemimpinan ekonomi di Pasifik Barat ini dari tangan Jepang dalam abad 21 mendatang. Dapat dipastikan, Cina tak dapat mundur lagi, Cina terus maju sebagai raksasa agung dan Cina telah lepas dari kukungan belenggunya.

Stabilitas domestik Cina secara relatif berjalan baik. Pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, sedangkan dunia bisnis Cina mulai bergerak ke luar negeri. Tidak kurang dari 4500 perusahaan Cina yang berbisnis ke luar. Modal investasinya lebih dari US\$5,2 milyar, angka ini menurut laporan dari "Multi Corporation Research Institute" : di Shanghai tahun lalu.

⁴ Umar Suryadi Bakri, *Op. Cit.*, hal. 149-150.

⁵ Merdeka, 15 September 1995.

Disamping itu, finek Cina hidup dalam simbiose, yaitu dalam suasana saling tolong-menolong dengan 55 juta Hoakiau yang tersebar di seluruh kawasan Asia Pasifik.

Inilah salah satu dasar perhitungan berbagai pengamat Internasional, bahwa Cina dimasa mendatang tidak hanya akan menandingi Jepang tetapi juga akan menggeser dan mengganti peran Jepang. Dalam pada itu, tingkah laku politik Cina diwaktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan nafsu ekspansionisme, terutama ke arah selatan, dimana terletak kepulauan Sparatly yang kaya akan sumber minyak, Cina juga mengutak-utik Natuna, yang kaya akan gas alam, dalam berbagai peta baru terbitan Peking (Beijing), kepulauan Natuna dimasukkan dalam wilayah kedaulatan maritim Cina. Ini juga terjadi pada wilayah Taiwan, yang merupakan salah satu wilayah Cina yang "hilang".

Pada tingkatan analisa sosial terlihat bahwa dengan terjalannya kontak dan pertukaran yang luas sejak normalisasi hubungan kedua negara, walaupun saling pengertian semakin bertambah, tetapi bermacam-macam masalah baru juga muncul. Perbedaan sistem nilai, stereotip, sistem ekonomi dan politik, sejarah, komposisi etnik, telah menyebabkan pola hubungan seperti siklus *Love and Hate Relationship* karena adanya harapan yang tidak realistis dari masing-masing pihak.⁶

Walau Taiwan sampai saat ini masih menolak tawaran integrasi Cina, sehingga Hongkong dan Macau menjadi semacam alat penekan bagi Taiwan bahwa konsep *One Country Two Systems* merupakan konsep yang baik. Ini juga ditujukan untuk dunia internasional, bahwa Cina benar-benar melaksanakan kebijaksanaannya dengan sungguh-sungguh. Jika konsep ini telah dilaksanakan dengan benar maka pandangan dunia internasional akan berubah semakin percaya dengan perubahan yang terjadi di Cina.

⁶ Ani W. Soetjipto, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 204.

Kepercayaan ini sangat diperlukan oleh Cina untuk melaksanakan cita-citanya, ditambah dengan kekuatan ekonomi Cina yang terus maju dan berkembang, menempatkan posisi Cina semakin kuat di dunia internasional. Kepercayaan ini mempermudah Cina untuk mencapai cita-citanya.

Cita-cita negara Cina Raya yang meliputi RRC, Hongkong, Macau dan Taiwan, merupakan Cita-Cita RRC untuk membentuk kembali daerah-daerah yang dulu sempat terpisah yang juga disebut dengan "wilayah yang hilang". Ini merupakan obsesi Cina sampai saat ini. Semua kawasan tersebut nantinya akan bergabung dengan daratan utama (mainland), dan akan dikenal dengan sebutan Cina Raya. Apabila wilayah-wilayah yang terpisah tersebut telah terintegrasi semuanya, maka negara Cina Raya akan dapat terwujud dan Cina akan mampu muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia yang sulit untuk ditandingi.

4.3 Wajah Baru Komunis Cina

Awal dimulainya pembaharuan di Cina yaitu pada saat dicanangkannya program modernisasi RRC yang dikenal dengan program "empat modernisasi" (pertanian, industri, iptek, dan pertahanan) oleh Deng Xiaoping, dan mulai saat itu pulalah RRC mengalami gejala "penurunan".⁷

Tidak jelas benar, apa maksud istilah penurunan ini. Tetapi terlihat jelas bahwa banyak kader yang meninggalkan partai dan korupsi. Alasan yang diajukan karena tugas sebagai kader sangat berat, menuntut pengorbanan bahkan pengorbanan seluruh keluarga, tetapi imbalan yang mereka terima sangat minim. Para pemimpin partai menyadari benar situasi tersebut. Menurut mereka, salah satu sebab dari kemunduran itu adalah rendahnya tingkat pendidikan. Kader dengan pendidikan yang minimal, sulit untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dimana kader dituntut tidak

⁷ Kompas, 27 Agustus 1993.

hanya mengetahui masalah ideologi dan politik, tetapi juga terampil dalam hal ekonomi.

Faktor lain yang mengancam posisi Partai Komunis Cina adalah adanya krisis ideologi. Karena kehidupan massa rakyat tidak terlampau tergantung lagi terhadap partai, makin banyak yang tidak patuh lagi dengan ideologi. Reformasi ekonomi dan keterbukaan telah mengakibatkan bahwa rakyat Cina tidak lagi terisolasi dari dunia luar, dan sadar akan segala hal yang terjadi di luar Cina.

Reformasi yang ada sangat menyimpang dari doktrin maxsisme yang ortodok, misalnya pasar bebas disamping sentralisasi negara, konsep *One Country Two System*, penanaman modal asing maupun kebebasan untuk beragama dan berbudaya. Laju perkembangan ekonomi yang begitu hebat di Cina, mendesak ideologi Komunis ke belakang. Diperkirakan pula sekarang tidak banyak rakyat Cina yang percaya akan komunisme. Namun, ironisnya krisis ideologi itu justru menguntungkan posisi Partai Komunis Cina. Rakyat, yang setiap gerak-geriknya diawasi, sekarang punya "kebebasan" asal saja tidak mengutak-atik posisi partai sebagai penguasa tunggal.⁸

Walaupun Cina telah dianggap oleh dunia internasional sebagai negara Komunis yang telah meninggalkan Sosialisme dan memeluk Kapitalisme, tetapi perlu juga diperhatikan tiga variabel pokok dalam melihat kecenderungan politik Cina. Semua ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan perkembangan politik Cina.⁹

Variabel pertama adalah kondisi dan situasi sistem internasional saat ini, yang diantaranya struktur kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan kepentingan, serta bagaimana posisi Cina dalam struktur tersebut. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah bentuk-bentuk dan pola-pola hubungan internasional yang berlangsung saat ini dan berpengaruh terhadap Cina.

⁸ Republika, 3 Desember 1995.

⁹ Jayakarta, 27 September 1991.

Variabel kedua adalah kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan domestik Cina. Kondisi ini tidak diselesaikan karena dari sini akan nampak bagaimana sikap mental budaya politik, serta orientasi masyarakat memandang politik dan kekuasaan. Dalam hubungannya dengan masa depan politik Cina, serta nilai Konfusianisme nampaknya tetap akan menjadi kendali. Rasanya sulit akan bisa terjadi perubahan-perubahan politik secara radikal di negara yang ekonominya cukup kuat dan stabil.

Sedangkan variabel yang ketiga adalah persepsi, motifasi, cita-cita, nilai-nilai dan ide para elit politik negeri Cina sendiri. Meski Dunia barat tidak henti-hentinya mendesak Cina agar memberi peluang bagi kehidupan demokrasi, namun pemerintahan Beijing nampaknya tidak akan menggeser dari politik-politik mereka selama ini. Konsolidasi untuk mempertahankan supremasi Partai Komunis Cina dalam kehidupan Politik bahkan semakin gencar dilakukan.

Walaupun kini sistem ekonomi Cina telah bergeser ke arah yang lebih kapitalis tetapi idiologinya tetap menggunakan dan mempertahankan Komunis, karena pada kenyataannya sistem *Jia* (kekeluargaan) yang merupakan akar budaya dari bangsa Cina adalah akar penguat sistem faham sama rata sama rasa yang dipergunakan sebagai idiologi negara. Selain luasnya negara Cina dan banyaknya jumlah penduduknya serta keragaman suku dan budayanya menyebabkan perlu adanya perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini. Sistem *Jia* yang disebutkan diatas merupakan alasan mengapa Cina masih mempertahankan Komunis sebagai dasar negaranya.

4.4 Penerapan Faham Komunis Dalam Kebijakan Ekonomi Cina Setelah Masuknya Wilayah Hongkong

Kembalinya wilayah Hongkong ke pangkuan Cina telah membawa perubahan besar di Cina sebagai negara induknya, walaupun pemerintah

Cina sendiri telah berjanji untuk memberikan masa transisi selama 50 tahun kepada Hongkong. Hal ini semakin memperkuat reformasi ekonomi yang masih terus berjalan di Cina.

Pembangunan ekonomi di Cina pada awalnya berdasarkan kekuatan pertanian yang ada (karena sebagian besar penduduk Cina adalah petani). Dengan doktrin "sama rata sama rasa" dan semangat untuk "bersama-sama dan bahu-membahu" membangun negara tanpa pamrih, menjadikan perekonomian yang ada di Cina semata-mata hanya untuk kepentingan negara. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran komunisme yang dianut Cina. Zhao Ziyang menyatakan bahwa kini Cina berada pada "tahap awal Sosialisme". Tahap awal dinyatakan mulai sejak tahun 1950-an dan akan berlangsung selama 100 tahun mendatang.¹⁰

Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, perekonomian Cina pada awalnya mengikuti langkah Rusia, yang nyatanya hal itu tidak sesuai dengan kepribadian dan keadaan bangsa Cina. Walaupun gerakan Lompatan Jauh Ke Depan telah gagal dilaksanakan, tetapi menjadi sebuah pelajaran yang berarti bagi pemimpin Cina berikutnya.

Deng Xiaoping telah menjadi tokoh sentral dalam modernisasi di Cina. Deng terkenal karena gagasan-gagasannya yang berciri pragmatis. Namun gebrakan Deng ini tidak dapat berjalan mulus, karena selain menghadapi golongan konservatif, tetapi juga dari kenyataan kegoncangan sosial dalam masyarakat Cina sendiri. Sehingga Deng melontarkan idiom baru yaitu "Sosialisme dengan warna Cina" yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang tengah berlangsung di Cina saat ini. Cina adalah negara sosialis, tetapi negara sosial yang mengadakan modernisasi.¹¹

Sedangkan Jiang Zemin yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Cina dalam pidatonya pada Konggres PKC XIV

¹⁰ Kompas, 7 Januari 1988.

¹¹ Umar Suryadi B., Op. Cit., hal. 41.

menegaskan bahwa Cina harus bisa menggunakan dana asing, sumber daya, teknologi untuk keuntungan ekonomi dan sosialisme Cina. Jiang juga menekankan bahwa dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui percepatan reformasi dan keterbukaan terhadap dunia luar jangan sampai terjebak ke dalam perdebatan abstrak mengenai apa yang dimaksud Kapitalisme dan apa yang dimaksud Sosialisme.¹²

Reformasi ekonomi yang terus dilakukan di Cina telah membawa perubahan besar pada perekonomian Cina. Dihitung berdasarkan patokan harga tetap, peningkatan GNP RRC selama 15 tahun berjalan telah bertambah 2,78 kali lipat sedangkan peningkatannya per tahun mencapai 9,3%.¹³ Dengan demikian RRC telah menjadi salah satu negara yang paling cepat pertumbuhan ekonominya di dunia. Seiring dengan itu, taraf hidup rakyat telah meningkat secara nyata. Selama 15 tahun dalam masa reformasi, pendapatan penduduk kota dan kecamatan per tahun meningkat 6,3%, sementara penduduk pedesaan mengalami peningkatan 8,5%.¹⁴

Setelah kembalinya wilayah Hongkong semakin memacu perekonomian Cina. Karena sebagai negara induk Cina tidak mau ketinggalan dari wilayahnya. Untuk mengimbangi kemajuan Hongkong, Cina telah membangun beberapa Daerah Ekonomi Khusus di beberapa wilayah yang strategis. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan yang akan terjadi antara Cina sebagai Negara Induk dan Hongkong sebagai wilayah Cina.

Daerah-daerah ekonomi khusus ini sengaja dipersiapkan oleh Cina untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di daratan Cina. Selain itu Cina juga memberikan kemudahan-kemudahan terhadap PMA. Hal ini menunjukkan bahwa Cina semakin terbuka terhadap dunia luar

¹² Kompas, 16 Oktober 1988.

¹³ Data Statistik Cina 1999, hal. 453.

dan menunjukkan bahwa pemerintah Cina semakin fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di dunia Internasional.

Selama masa pemerintahan Jiang Zemin, Cina telah berusaha melaksanakan reformasi ekonomi sebaik mungkin, dengan tidak mempengaruhi ideologi mereka. Walaupun tekanan dan rong-rongan dari dunia luar juga semakin gencar ke Cina untuk mengadakan Demokratisasi, tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah dan laju reformasi Cina.

Pemerintahan Jiang sendiri sudah mulai mengadakan regenerasi untuk memperkuat barisan reformasi ekonominya. Hal ini juga menunjukkan betapa Cina terus berbenah diri dalam menghadapi dunia internasional. Ditambah dengan kehadiran Hongkong dengan segala atributnya membuat Cina semakin mudah dalam mengadakan reformasi.

Kehadiran Hongkong semakin membuka mata dan kesadaran Cina akan pentingnya kehidupan Internasional. Hal ini juga menyebabkan Cina untuk memperhatikan negara sekitarnya dan berusaha untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara tersebut. Dengan belajar dari sejarah yang pernah terjadi di Cina menyebabkan Cina juga harus waspada pada perkembangan yang terjadi di dunia luar. Ini semakin menguatkan Cina untuk bekerja sama dengan negara tetangganya untuk menjamin keamanan negaranya.¹⁵

Hongkong sebagai wilayah Cina yang mempunyai ekonomi lebih pesat dibandingkan dengan Cina, sangat mendukung Cina untuk melakukan reformasi ekonomi, dengan cara mengundang para investor Cina untuk menanamkan modalnya di Hongkong. Hal ini selain untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi juga untuk mempererat hubungan antara Cina sebagai negara induk dan Hongkong sebagai wilayahnya.

¹⁴ Poltak Partologi Nainggolan, Op. Cit., hal. 170.

¹⁵ Suara Pembaharuan, 23 Maret 1997.

4.4.1 Kebijakan Kedalam

Kebijakan ekonomi Cina yang beorientasi kedalam, yang paling menonjol adalah sistem ekonomi pasar Sosialis yang menghasikan suatu perekonomian dengan peran pasar yang memainkan peran secara definitif dalam alokasi sumber kebutuhan ekonomi.

Sistem ekonomi sebagaimana diproyeksikan RRC untuk abad 21 tersebut berbeda besar dari sistem ekonomi terencana RRC dimasa pra reformasi, sebab sistem ini menetapkan kuota produksi seluruh negeri, menentukan nasib semua komoditi, jasa dan alokasi sumber daya manusia.

Di wilayah pedesaan, sistem pertanian yang berlandaskan keluarga menggantikan sitem pertanian kolektif, suatu produk sistem perencanaan terpusat, yang ternyata tidak efisien. Di kota-kota para manager industri mendapatkan lebih banyak keleluasaan untuk membuat keputusan bisnis, tentang apa yang mereka produksi dan untuk konsumen yang mana. Dengan mendalam dan meluasnya reformasi, pengendalian harga bagi sejumlah besar barang konsumsi mulai dihapus, dan demikian pula dengan kebanyakan barang modal. Dewasa ini, peran negara hanya menetapkan 5,6% dari harga semua barang. Itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.¹⁶

.. Pembaharuan sistem harga, tetap harus dijalankan dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun, harga dari banyak komoditas ditentukan oleh negara, dengan seluruhnya mengabaikan hukum nilai. Pembaharuan sistem harga adalah hal yang paling sukar dilaksanakan oleh pemerintah RRC, karena dapat membawa dampak luas, baik pada rumah-rumah tangga, maupun berbagai jenis perusahaan. Jika diberlakukan secara tiba-tiba,

¹⁶ Poltak Partologi N., Op. Cit., hal. 173.

harga-harga barang akan langsung membumbung tinggi dan mengakibatkan inflasi, oleh pengaruh dilepasnya secara bebas, kendali atas harga.

Sistem pra reformasi ditandai oleh sistem distribusi tunggal oleh negara. Negara merupakan institusi yang menentukan secara mutlak jenis dan banyak produk untuk suatu wilayah tertentu. Tidak pernah terfikir oleh negara untuk berupaya memuaskan, apalagi menyenangkan konsumen, meskipun mereka adalah rakyatnya juga.

Hal sama terjadi pula pada produk-produk impor, yang pada umumnya terdiri dari barang-barang industri. Namun pada masa reformasi ekonomi perubahan bidang distribusi yang berlangsung sejak tahun 1986, barang-barang dapat dikirim ke daerah yang konsumennya membutuhkan atau mau membelinya. Dampak positifnya, terjadilah kompetisi ketat di pasar. Para pengusaha menyiapkan strategi penjualan dengan barisan-barisan penjual yang siap mengantarkan produk-produk mereka ke seluruh wilayah. Armada penjualan dengan truk-truk pengangkutnya telah membentuk jaringan yang melayani penjualan antar kota dan mengirim produk hingga ke daerah-daerah pedalaman.

Sebagai respon atas perkembangan industri yang ada, pemerintah RRC telah siap mengantisipasi perusahaan-perusahaan negara yang tidak berhasil. Selanjutnya, pemerintah akan memaksakan reformasi ekonomi yang telah mentransformasikan sektor-sektor ekonomi lainnya, kepada sektor negara. Pernyataan bangkrut, *merger* ataupun pemecatan akan diberlakukan. Baik para manajer maupun pekerja, akan lebih memiliki keterkaitan yang mendalam. Upah ataupun gaji akan dikaitkan dengan efisiensi, sehingga semakin efisien manajemen, akan semakin banyak penghasilan yang akan diperoleh. Kapitalisme dan perusahaan swasta telah dipercaya sebagai sarana untuk membangun Sosialisme dengan karakter Cina.

4.4.2 Kebijakan Keluar

RRC adalah suatu negara yang terletak di kontinen Asia. Negara tersebut terletak pada 18 derajat 30 menit sampai 55 derajat lintang utara dan 70 derajat sampai 133 derajat bujur timur. Disebelah utara berbatasan dengan Mongolia Luar. Disebelah Timur Laut berbatasan dengan Uni Soviet, Korea Utara dan Laut Kuning. Disebelah Timur berbatasan dengan Jepang, Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Di sebelah tenggara berbatasan dengan Macau, Hongkong, Taiwan dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan India, Burma, Laos, Vietnam Utara dan Pegunungan Himalaya. Di sebelah barat laut berbatasan dengan Nepal, Kerajaan Bhutan, India dan Pegunungan Himalaya. Sedangkan di sebelah Barat Daya berbatasan dengan Uni Soviet, afganistan dan Pakistan.¹⁷

Dari pengungkapan data-data strategis diatas merupakan hal yang penting dalam pembahasan hubungan internasional suatu negara, karena data-data tersebut akan menerangkan tingkah laku luar negerinya dan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Hal tersebut akan menerangkan pula apa yang merupakan kriteria ancaman bagi negara itu dan bagaimana strategi penangkalan yang harus diambil jelaslah diketahui, bahwa setiap perkembangan politik internasional di sepanjang perbatasan, di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Pasifik, akan mempengaruhi situasi keamanan nasional di negara RRC, mengingat :

1. RRC mempunyai garis perbatasan yang panjang, yaitu lebih dari 20.000 kilometer persegi dan berbatasan dengan 12 negara, khususnya yang terpanjang dengan Uni Soviet;
2. Kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Pasifik secara historis mempunyai arti tersendiri bagi RRC. Kawasan-kawasan ini adalah wilayah pengaruh sebelah belakang dan sisi kanan negara RRC;

¹⁷ Ibid, hal. 110.

3. Beberapa daerah disepanjang perbatasan dan ketiga kawasan tersebut merupakan tempat-tempat yang strategis secara militer dan ekonomi, bagi RRC.

Pembahasan faktor internasional sebagai variabel bebas secara tersendiri, dalam menganalisis latar belakang reformasi struktur ekonomi RRC pasca 1978, adalah penting, karena faktor ini merupakan salah satu penyebab pula, mengapa diadakan reformasi struktur ekonomi oleh pemerintah RRC, pasca 1978. Penguraian faktor internasional dengan cukup panjang lebar, akan menerangkan bagaimana evaluasi, pandangan dan sikap RRC sebagai sebuah negara dan bangsa yang besar, dalam menghadapi tantangan yang mengancam hidup, kepentingan nasional dan wilayah pengaruhnya.

Dalam pandangan RRC, kawasan Asia Timur memegang peranan yang sangat penting, karena dikawasan inilah tepatnya pengalaman pahit dengan kawasan tersebut dimasa lalu, yakni pernah merasakan chauvinisme bangsa Jepang dan politik pengepungan Amerika Serikat. Sesudah itu kawasan Asia Timur berkembang menjadi arena perebutan pengaruh dan Uni Soviet, dalam melaksanakan kepentingan politik militer strategis, serta tidak luput dari kepentingan ekonomi nasional, kelompok atau persekutuan, maupun regional, yang dampaknya harus dihadapi oleh RRC.

Cina juga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Rusia, dan berusaha untuk mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antar pemerintah daerah khususnya diwilayah-wilayah perbatasan yang merupakan jembatan dan penghubung dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang menyeluruh antara kedua negara.

Amerika Serikat yang merupakan negara adi kuasa, pada awalnya dikategorikan sebagai musuh yang harus ditentang, karena nafsu Imperialisme, Kolonialisme dan Hegemonisme mereka. Sikap politik luar

negeri RRC telah berubah, dari sikap mencari musuh di dunia, kepada sikap strategi global yang berusaha memperoleh sekutu sebanyak mungkin.

Hubungan ekonomi dan perdagangan Cina dengan Amerika Serikat selama tahun 1999 telah berkembang baik meskipun sempat terjadi beberapa friksi dalam hubungan kedua negara yang tampaknya akibat ketidak seimbangan atau defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Cina yang semakin meningkat. Amerika sangat ideal sebagai mitra usaha karena memiliki iptek yang tinggi, dana yang cukup dan keahlian manajemen yang efisien.

Beranjak dari perubahan itu, RRC kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemerintah Jepang, yang sekarang adalah mitra dagang terbesar Cina dan volume perdagangan kedua negara pada tahun 1998 mencapai US\$60,8 milyar, naik 12% dibanding tahun 1997.

Dalam upaya membangun kekuatan nasional, pemerintah RRC mengetahui bahwa bagaimanapun juga, negaranya tidak dapat menggantungkan diri selamanya pada negara lain. Hal ini diperhitungkan oleh pemerintah RRC untuk menghadapi setiap masalah yang timbul, maka Cina berusaha untuk memperkuat ekonominya dan posisinya di dunia internasional.

Masuknya Cina sebagai anggota WTO di PBB semakin menguatkan posisi perekonomian Cina. Hal ini juga semakin membuka mata dunia internasional tentang kemajuan yang telah dicapai oleh negara Cina. Dengan menjadi anggota WTO Cina bisa ikut menentukan patokan resmi nilai harga dan juga semakin jelas pula bahwa Cina sudah siap masuk dalam era pasar bebas.

Pada akhirnya perlu dipertanyakan : Cina sosialis atau kapitalis ? pertanyaan ini adalah pertanyaan idiologi. Bila ditilik dari sistem ekonominya, Cina barangkali dapat dikatakan telah bergeser (sedikit) dari sistem Ekonomi

Sosialis. Meskipun demikian sistem ekonomi hanyalah salah satu ekspresi dari ideologi. Ideologi lebih luas dari pada sistem ekonomi.

Ideologi pertama-tama adalah sistem nilai. Dalam ideologi Sosialisme, nilai tertinggi adalah masyarakat yang makmur, sama rata dan sama rasa. Lain dari ideologi Kapitalisme yang menjunjung tinggi *high mass consumption*. Jika hal itu diekspresikan dalam sistem ekonomi maka sifatnya komplementer (dalam sejarah terbukti, bahwa sistem ekonomi negara-negara Sosialis berbeda-beda satu dengan yang lain, namun mereka tidak pernah dikatakan Kapitalis).

Oleh sebab itu, selama sistem nilai yang dianut oleh Cina tetap nilai Sosialis, Cina tetap dikatakan negara yang menganut Sosialisme. Hal ini paling jelas dari cara Cina menyusun periodisasi sejarahnya (Cina pada tahap awal Sosialisme), dan antara sistem nilai dan sistem ekonomi terdapat suatu perbedaan.

Dengan penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa Konsep *One Country Two Systems* yang diberlakukan Cina setelah reunifikasi Hongkong sangat tepat untuk diterapkan. Cina sampai saat ini tetap bertahan pada komitmen mereka, bahwa mereka hanya berdasarkan pada satu ideologi yaitu Komunis, tetapi terbuka untuk sistem lainnya seperti sistem ekonomi selama sistem tersebut menguntungkan bagi negara Cina sendiri.

V. KESIMPULAN

Perubahan yang terjadi pada kebijaksanaan politik ekonomi cina yang komunis berlangsung secara perlahan namun pasti, terutama dalam mempersiapkan terbentuknya Cina Raya dengan didukung kembalinya Hongkong dan Macao sebagai wilayah "*The Lost Teritory*". Perundingan tentang pengembalian Hongkong ke Cina yang memakan waktu lama telah membuat cina mempersiapkan kondisi dalam negerinya. Perekonomian Hongkong yang maju pesat ditambah dengan luasnya hubungan Hongkong dengan dunia internasional, menjadikan Cina kelihatan sebagai induk yang mendapatkan telur emas.

Kembalinya wilayah Hongkong ke Cina telah membawa perubahan besar pada Cina sebagai negara induk. Cina sebagai negara Komunis berusaha membangun perekonomian negaranya secara lebih Liberal. Kemajuan yang ditempuh Cina ini diharapkan tidak mengganggu kestabilan politik di negara Cina. Maka untuk itu Cina menerapkan konsep *One Country Two System*, dan untuk mengimbangi keadaan Hongkong, Cina juga membentuk daerah ekonomi khusus.

Pembentukan daerah ekonomi khusus ini sebenarnya telah menyimpang dari ajaran Komunis. Dalam ajaran Komunis, seluruh perekonomian ditangani oleh pusat atau negara dan semua untuk kepentingan negara, dengan semboyan "sama rata sama rasa". Sedangkan pada daerah ekonomi khusus ini, Cina memberikan kelonggaran dalam menjalankan roda perekonomian daerahnya. Hal ini belum pernah dilakukan oleh Cina sebelumnya. Apalagi dengan diberikannya masa transisi selama 50 tahun kedepan dan otonomi luas kepada Hongkong telah menunjukkan bahwa Cina sedang dalam masa transisi juga.

Keadaan Cina sebagai negara besar yang ditunjang dengan besarnya Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, mempermudah Cina dalam

memajukan perekonomiannya. Ditambah dengan banyaknya pengalaman jaman dahulu yang mengajarkan kepada Cina tentang cara-cara memperbaiki keadaan ekonomi dan politik negaranya, seperti Revolusi Budaya maupun Lompatan Jauh ke Depan.

Konsep *One Country Two System* merupakan sebuah konsep yang diartikan Cina sebagai satu negara Komunis yang memiliki dua sistem ekonomi. Dalam hal ini Cina semakin terbuka dengan dunia luar terutama bila menyangkut masalah perekonomian, tetapi Cina sangat tertutup dan protektif pada idiologinya, karena Komunisme bukan hanya sebagai ideologi yang dijunjung tinggi tetapi juga merupakan alat pemersatu Cina.

Walaupun sedikit menyimpang dari Komunisme, perekonomian Cina ternyata mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini semakin membuat Cina berusaha untuk memajukan perekonomiannya. Memang perekonomian Cina tidak 100% berubah, hal ini terbukti dengan masih adanya campur tangan pemerintah pada beberapa wilayah di pedalaman Cina maupun pada BUMN-BUMN itu sendiri.

Kini negara Cina telah tumbuh sebagai negara Komunis dengan perekonomian yang sangat kuat. Hal ini juga menguatkan posisi Cina di dunia internasional. Dibantu dengan masuknya wilayah Hongkong semakin mempermudah Cina mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional, juga dengan masuknya Cina sebagai anggota WTO menunjukkan bahwa Cina telah terbuka dengan dunia luar.

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik ekonomi Cina yang berdasarkan pada Komunisme telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih Liberal seiring dengan semakin majunya tingkat perekonomian dan semakin terbukanya Cina terhadap dunia luar.

2. Paham Komunis yang tetap dipertahankan oleh Cina hanya sebatas sebagai ideologi dan pemersatu bangsa yang telah dianut sejak lama, membuat rakyat Cina sendiri berusaha untuk mempertahankan keberadaannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bakri. U.S, 1997, *Cina In Quo Vadis?*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Balitbang, 1986, *RRC Menjelang Tahun 2000 (Dengan Latar Belakang Sejarah Cina Kuno)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta.
- Budiarjo. M, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1992, *Pendekatan ilmu-ilmu Politik Bagian II, dalam Jurnal Ilmu Politik I*, Gramedia, Jakarta.
- Davis. M.C, 1990, *Contitutional Confrontation In Hongkong, Issues and Implication of The Basic Law*, ST Martin Press, New York.
- Effendi. S, 1986, *Unsur-Unsur Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta.
- Frangkel. J, 1980, *Hubungan Internasional*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Hadi. S, 1993, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hamid. Z, 1996, *Sistem Politik Pasifik Selatan*, Pustaka Jaya, Jakarta
- Hornby. AS, 1983, *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English*, Oxford University Press, London.
- Jones. W.S, 1993, *Logika Hubungan Internasional ; Kekuatan Utama*, Jilid II, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1983, *Metoda Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.

- Marton. A.M, ... , *Hongkong In China, Perpective From Region*, Singapore University Press, National University of Singapore.
- Mas'oed. M, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- Melly G. Tan, 1987, *Masalah Perencanaan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- Nainggolan. P.P, 1995, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiouping*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Riff. M.A,(ed), 1995, *Kamus Idiologi Politik Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Said. A dan C. Larche, 1963, *Conseps Of International Politics*, Englewood Cliff.
- Sammuel. S, (ed), 1992, *China and the World : New Direction In Chinese Foreign Relations*, Westview Press, New York.
- Shambazy. H.U, 1990, *Politik Luar Negeri Cina Kini Dan Esok – Global I*, Gramedia, Jakarta.
- Snyder. R.C, 1962, *Foreign Policy Decision Making*, Gramedia, Jakarta.
- Soetjipto. A.W, 1996, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sukisman. W.D,1992, *Sejarah Cina Kontemporer*, Jilid I, Pradia Paramita, Jakarta.

Surahmad. W, 1975, *Dasar dan Tehnik Research*, Transito, Bandung.

Jurnal dan Makalah

- Analisis CSIS : Tahun XIX No. 4, Juli-Agustus 1990
- Analisis CSIS, No. 6, 1997
- Asia 1999 Year Book In Far Eastern Economic Review 1999
- Asian Security 1998-1999
- Bangsa dan Negara, 1990, edisi 4
- Data Statistik Cina 1999
- Journal of Sosial, Political and economic Studies Monograf series, Vol. 18
- Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri, 1999
- The China Quarterly, No. 136, 1993
- The China Quarterly, No. 155, 1997

Koran

- Bisnis Indonesia, 19 April 1998
- Bisnis Indonesia, 17 April 1997
- Jayakarta, 27 September 1991
- Jawa Pos, 16 Januari 1997
- Kompas, 22 Maret 1993
- Kompas, 27 Agustus 1993
- Kompas, 5 November 1995
- Kompas, 19 Maret 1997
- Kompas, 2 Juli 1997
- Kompas, 7 Januari 1988
- Kompas, 29 April 1998
- Kompas, 16 Oktober 1988
- Media Indonesia, 17 April 1997
- Merdeka, 15 September 1995
- Merdeka, 22 Desember 1995
- Merdeka, 27 Februari 1997
- Republika, 10 Februari 1994
- Republika, 3 Desember 1995
- Surabaya post, 19 Desember 1995
- Suara Pembaharuan, 23 Maret 1997

Lampiran 1 : A[McMcX1] Draft Agreement between The Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & The Government of People's Republic of China on The future of Hong Kong.

**JOINT DECLARATION
OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTERN IRELAND
AND
THEGOVERMENT OF THE PEOPLE'S REPLUBLIC OF CHINA
ON THE QUESTION OF HONG KONG**

The Go Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & The Government of the People's Republic of China have reviewed with satisfaction the friendly relations existing between the two Government and people in recent years and agreed that a proper negotiated settlement of the question of Hong Kong, wich left over from the past, is conductive to the maintenance of the prosperity and stability of Hong Kong and to the further strengthening and development of the reations between the two countries on a new basis. To this end, they have, after talks between the delegation of the two Government, agreed to declare as follows:

1. The Government of the People's Replublic of China declares that to recover the Hong Kong area (including Hong Kong island, Kowloon and the New Territories, hereinafter referred to as Hong Kong)is the common aspiration of the entire Chinese people, and that it has decided to resume the exercise t sovereignty over Hong Kong with effect from 1 july 1997.

2. The Go Government of United Kingdom declares that it will restore Hong Kong to The People's Republic of Chinawith effect from 1 july 1997.

3. The Government of the People's Replublic of China declares that the basic olicies of the People's Republic of China regarding hong Kong are as follow:

(1) Upholding national unity and teritorial integrity and taking account of the history of Hong Kong and its relities, the People's Replublic of China has decided t establish, in accordance with the provisions of Article 31 of the Constituion of the People's Replublic of China, a Hong Kong special

Administrative Region upon resuming the exercise of sovereignty over Hong Kong.

(2) The Hong Kong Special Administrative Region will be directly under the authority of the Central People's Government of the People's Republic of China. The Hong Kong Special Administrative Region will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs which are the responsibilities of the Central People's Government.

(3) The Hong Kong Special Administrative Region will be vested with executive, legislative, and independent judicial power, including that of final adjudication. The laws currently in force in Hong Kong will remain basically unchanged.

(4) The Government of the Hong Kong Special Administrative Region will be composed of local inhabitants. The chief executive will be appointed by the central People's Government on the basis of the results of elections or consultations to be held locally. Principal officials will be nominated by the chief executive of the Hong Kong Special Administrative Region for appointment by the Central People's Government. Chinese and foreign nationals previously working in the public and police services in the government departments of Hong Kong may remain employed to serve as advisers or hold certain public posts in government departments of the Hong Kong Special Administrative Region. Private property, ownership of enterprises, legitimate right of inheritance and foreign investment will be protected by law.

(6) The Hong Kong Special Administrative Region will retain the status of a free port and a separate customs territory.

(7) The Hong Kong Special Administrative Region will retain the status of an international financial centre, and its markets for foreign exchange, gold, securities and futures will continue. There will be free flow of capital. The Hong Kong dollar will continue to circulate and remain freely convertible.

(8) The Hong Kong Special Administrative Region will have independent finances. The Central People's Government will not levy taxes on Hong Kong Special Administrative Region.

(9) The Hong Kong Special Administrative Region may establish mutually beneficial economic relations with the United Kingdom and other countries, whose economic interests in Hong Kong will be given due regard.

(10) Using the name of "Hong Kong, China", the Hong Kong Special Administrative Region may continue to maintain and develop economic and cultural

relation and conclude relevant agreements with states, region and relevant international organisations.

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region may on its own issue travel documents for entry into and exit from Hong Kong.

(11) The Maintenance of public order in the Hong Kong Special Administrative Region will be responsibility of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region.

(12) The above-state basic policies of the People's Republic of China regarding Hong Kong and the elaboration of them in Annex I to this Joint Declaration will be stipulated, in a basic law of the Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China, by the National People's Congress of the People's Republic of China, and they will remain unchanged for 50 years.

4. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's Republic of China declare that, during the transitional period between the date of the entry into forces of this Joint Declaration and 30 June 1997, the Government of the United Kingdom will be responsible for the administration of Hong Kong with the object of maintaining and preserving its economic prosperity and social stability; and that the Government of the Republic of China will giving its cooperation in this connection.

5. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's Republic of China declare that, in order to ensure to smooth transfer of government in 1997, and with the view to the effective implementation of this Joint Declaration, a Sino-British Joint Liaison Group will be set up when this Joint Declaration enters into force; and that it will be established and will function in accordance with the provisions of Annex II to this Joint Declaration.

6. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's Republic of China declare that land leases in Hong Kong and other related matters will be dealt with in accordance with the provisions of Annex II to this Joint Declaration.

7. The Government of the United Kingdom and the Government of the People's Republic of China agree to implement the preceding declarations and the Annexes to this Joint Declaration.

8. This Joint Declaration is subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification, which shall take place in Beijing before 30 June 1985. This Joint Declaration and its Annexes shall be equally binding.

Done in duplicate at Beijing on 1984 in the English and Chinese languages, both texts being equally authentic.

For the
Government of the United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

For the
Government of the
People's Republic of
China

Source : A[McMeX2] Draft Agreement between The Government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & The Government of People's Republic of China on The future of Hong Kong, Her Majesty's Stationery Office, London, September 1984, 11 -13.

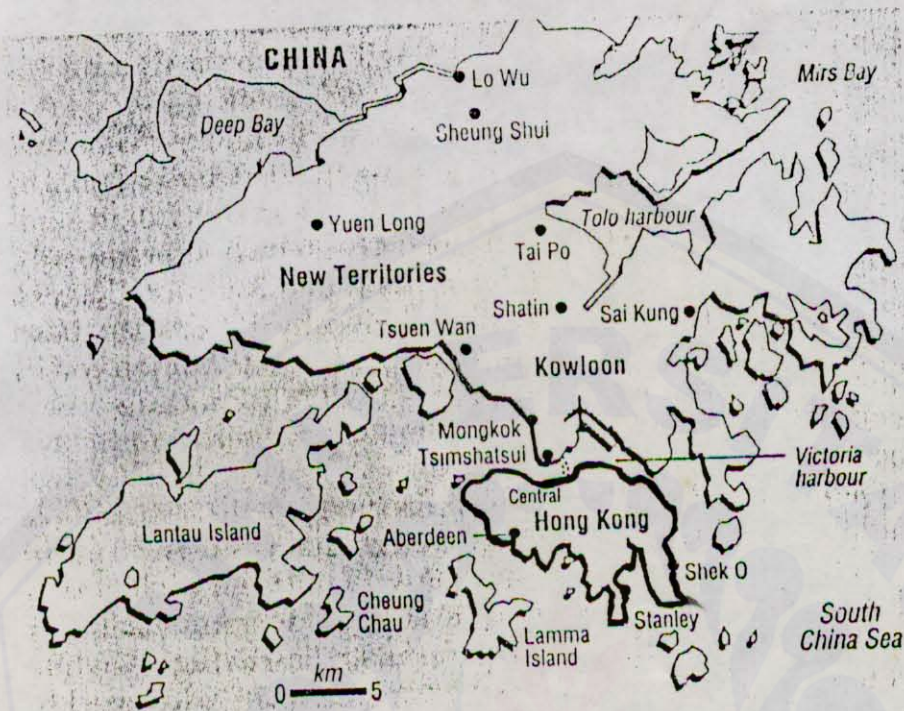
Lampiran 2 : Peta Negara Cina



Chinese Communist Party Politburo Restructuring of the Economic System Labour Water Resources

Jember : Asia 1999 Year Book in Far Eastern Economic Review 1999.

Lampiran 3 : Peta Wilayah Hongkong



Sumber : Asia 1999 Year Book in Far Eastern Economic Review 1999.